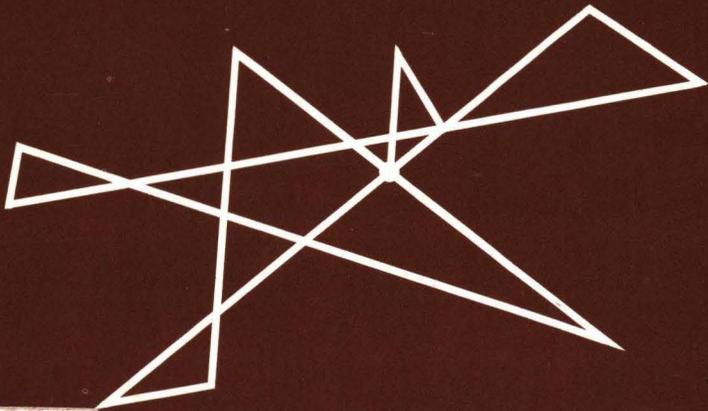


DRS MOH. AMIR SUTAARGA

# STUDI MUSEOLOGIA

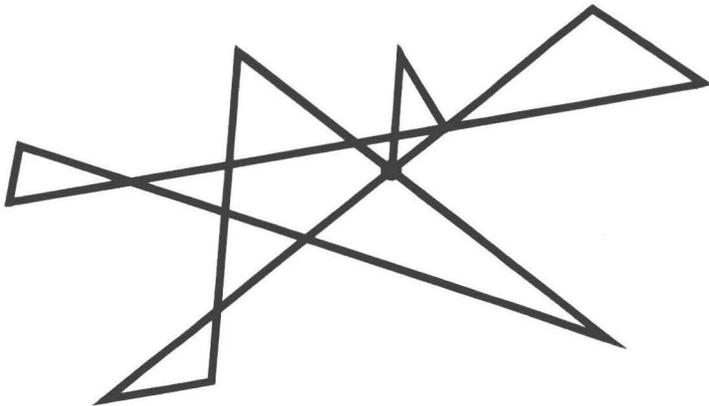


069  
SUR  
s.5

Diterbitkan Oleh :  
PROYEK PEMBINAAN PERMUSEUMAN JAKARTA  
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
1990 / 1991

DRS MOH. AMIR SUTAARGA

# STUDI MUSEOLOGIA



Diterbitkan Oleh :  
PROYEK PEMBINAAN PERMUSEUMAN JAKARTA  
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
1990 / 1991

## DAFTAR ISI

	Halaman
- Sambutan Direktur Permuseuman .....	v
- Sambutan Pemimpin Proyek Pembinaan Permuseuman .....	vii
- Pendahuluan .....	1
- Pokok - Pokok Pengertian tentang Sistem Permuseuman .....	3
- Museologi Sebagai Instrumen Bagi Pengelolaan Proyek Permuseuman .....	7
- Dokumentasi dan Informasi Benda Budaya .....	23
- Museum Sebagai Alat Komunikasi Antar Budaya .....	33
- Arkeologi Museum Suatu Perkenalan .....	46
- Perkembangan dan Pengembangan Sistem Permuseuman .....	53
- Peranan Museum Dalam Pendidikan .....	63
- Profesionalisme di Museum .....	76

## SAMBUTAN DIREKTUR PERMUSEUMAN

Perkembangan Permuseuman di Indonesia dewasa ini secara fisik cukup menggembirakan, namun hal tersebut kurang diimbangi perkembangan kemampuan di bidang ketenagaan. Hal ini bukan hanya karena belum adanya lembaga pendidikan yang formal di bidang permuseuman namun juga karena sangat terbatasnya literatur tentang permuseuman. Untuk itu Direktorat Permuseuman sebagai unsur pembina permuseuman di Indonesia berusaha menerbitkan buku-buku yang dipandang dapat memperluas wawasan masyarakat, khususnya yang terlibat langsung dengan bidang tugas di museum.

Pada tahun anggaran 1990/1991 ini melalui Proyek Pembinaan Permuseuman Jakarta, Direktorat Permuseuman menerbitkan buku "Studi Museologia", kumpulan dari ceramah-ceramah Bapak Drs. Moh. Amir Sutaarga, mantan Direktur Permuseuman yang pertama. Diharapkan bahwa buku ini akan dapat menambah pengetahuan tentang Ilmu Permuseuman di Indonesia, khususnya bagi para pengelola museum mengenai arti, fungsi dan keamanan suatu museum di Indonesia.

Jakarta,            Januari 1991  
Direktur Permuseuman

Dra. Sri Soejatmi Satari  
NIP. 130 175 305

## SAMBUTAN PEMIMPIN PROYEK PEMBINAAN PERMUSEUMAN JAKARTA

Keberhasilan pengelolaan suatu museum sangat ditentukan oleh kemampuan dan keterampilan tenaga pengelolanya, di samping penampilan dari museumnya sendiri.

Untuk meningkatkan kemampuan tenaga pengelola museum, di samping melalui penataran-penataran, juga melalui penyediaan referensi permuseuman yang dapat memperluas wawasan para pengelola museum tersebut. Untuk itu, maka Proyek Pembinaan Permuseuman Jakarta melalui kegiatan "Penyusunan dan Penerbitan Naskah" tahun anggaran 1990/1991 menerbitkan buku "Studi Museologia" yang merupakan kumpulan ceramah dan makalah tentang permuseuman yang disusun oleh Drs. Moh Amir Sutaarga.

Drs. Moh Amir Sutaarga adalah mantan Direktur Permuseuman yang pertama dan juga seorang pakar permuseuman yang terus berusaha menggali dan mengembangkan pemikiran-pemikiran tentang museum dan permuseuman di Indonesia.

Dengan terwujudnya penerbitan buku ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Bambang Sumadio (mantan direktur Permuseuman yang kedua) dan Ibu Dra. Sri Soejatmi Satari (Direktur Permuseuman yang baru) yang telah memberikan petunjuk dan pengarahannya. Juga kepada Bapak Drs. Moh Amir Sutaarga yang telah memberikan ijin bagi penerbitan buku tersebut, serta beberapa staf Direktorat Permuseuman selaku tim editing dan perwajahan.

Mudah-mudahan dengan terbitnya buku ini akan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang permuseuman bagi para pembaca, khususnya para pengelola museum di Indonesia.

Jakarta,            Januari 1991  
Pemimpin Proyek Pembinaan  
Permuseuman Jakarta

Drs. Tedjo Susilo  
NIP 130 352 848

## Pendahuluan

STUDI MUSEOLOGIA , suatu himpunan ceramah, makalah dan karangan dari saya ini, merupakan buah pikiran mengenai beberapa hal yang termasuk bidang studi museologi.

Maksud pengadaaan ini ialah sebagai bersinambung dengan himpunan karangan-karangan penulis, yakni : (1) Persoalan museum di Indonesia; (2) *Capita selecta* museografi dan museologi, jilid I sampai dengan jilid III, yang kesemuanya itu diterbitkan oleh Direktorat Permuseuman. Sedangkan himpunan karangan di bawah judul STUDI MUSEOLOGIA ini, ditulis setelah saya alih tugas ke Universitas Indonesia sebagai tenaga pengajar dan penyusun program museologi.

Museologi dewasa ini telah berkembang di pelbagai negara, apalagi setelah di lingkungan ICOM (The International Council of Museums) telah didirikan pula komite internasional yang baru, yakni 'International Committee for Museology' disingkat ICOFOM, maka sudah banyak pertemuan tingkat profesional dan internasional diselenggarakan, baik oleh komite itu sendiri, maupun dengan pertemuan gabungan bersama komite-komite internasional lainnya, khususnya dengan International Committee for Museum Training. Hanya perlu diakui, bahwa museologi sebagai suatu disiplin yang mandiri, sekalipun memiliki cara pendekatan yang interdisipliner, masih dijadikan bahan perdebatan. Inilah mungkin sebabnya, mengapa rencana ICOM untuk menerbitkan 'Treatise on museology' belum juga terlaksana. Di Amerika Serikat saja ada sementara kalangan yang memandang museologi sebagai disiplin yang masuk dalam kelompok ilmu-ilmu budaya (humanities), sedangkan menurut sistem klasifikasi Dewey, 'museology' termasuk kelompok 'Anthropology'. Di lain kesempatan penulis akan mencoba untuk membuat suatu hasil pengamatan dan ulasan mengenai hal itu, sementara kita didesak oleh kebutuhan-kebutuhan suatu museologi yang bersifat 'praktis', sambil berjalan terus mengembangkan hal-hal yang akan mendukung pengembangan metodologi dan teori.

Mudah-mudahan himpunan ini dapat bermanfaat, terutama bagi mereka yang bertugas di 'lapangan' sebagai 'administrator' atau sebagai 'manajer' di bidang permuseuman, baik yang ada di kantor-kantor wilayah depdikbud maupun yang ada di pelbagai museum, sebab, bagaimanapun

kita harus akui, bahwa bukan saja bahan kepustakaan museologi itu kurang adanya pada kita, tetapi juga waktu pun masih kurang untuk membaca bahan kepustakaan mengenai suatu ilmu yang sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari kemampuan pengetahuan dan keahlian tugas-tugas pokok yang sedang digarap.

Dengan terbitnya majalah MUSEOGRAFIA, dengan penampilan yang baru dan dengan dimuatnya karangan - karangan 'muka-muka baru', saya sangat senang. Senang, bahwa di antara sekian banyak 'anak asuh' saya itu sudah ada yang mampu mengutarakan hasil kajian, pengamatan, percobaan, analisis, pokoknya, mereka sudah 'berani' mengemukakan buah pemikiran mereka melalui media tulis. Inilah soalnya, kita harus tetap menggalakkan kegiatan dan kebiasaan 'baca-tulis' sebab tanpa kebiasaan itu, di samping diskusi, maka ilmu apapun tidak bisa berkembang.

Mudah-mudahan himpunan ini ada manfaatnya, dan kepada peminat serta pembacanya, saya sampaikan banyak terimakasih.

MOH. AMIR SUTAARGA

# POKOK-POKOK PENGERTIAN TENTANG SISTEM PERMUSEUMAN

## 1. Museum dan Permuseuman

Makalah ini sengaja dimulai dengan mengemukakan istilah museum dan permuseuman, agar arah pembahasan selanjutnya menjadi jelas. Pengertian museum yang gamblang senantiasa diambil dari definisi tentang museum, seperti yang tercantum dalam Statutes International Council of Museums (ICOM), yang praktis telah berlaku di seluruh dunia. Bunyi definisi tersebut, sebagai berikut: Museum adalah sebuah lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan, melayani masyarakat dan perkembangannya, terbuka untuk umum, yang mengumpulkan, merawat, mengkomunikasikan dan memamerkan, untuk tujuan-tujuan studi, pendidikan dan kesenangan, bukti-bukti material manusia dan lingkungannya. Sedangkan permuseuman ialah ibarat suatu dunia atau segala hal yang berkaitan dengan museum. Dalam bahasa Inggris memang sulit dicari istilahnya, tetapi dalam bahasa Jerman dan bahasa Belanda, dijumpai istilah *museumwezen*. Selain itu, sebuah museum apabila dipandang sebagai suatu lembaga atau organisasi juga merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai elemen atau komponen yang satu sama lainnya berhubungan, berinteraksi, karena setiap komponen itu hidup, bergerak, karena berfungsi. Komponen-komponen sistem museum itu ialah personil, gedung, koleksi, publik, dan sarana serta fasilitas lainnya. Tetapi apabila diambil istilah sistem permuseuman, maka komponen-komponen lainnya berhubungan dalam satu jaringan kerja. ICOM merupakan suatu supra sistem permuseuman yang mengikat museum-museum dalam satu wadah profesi. Ikatan profesi itu bukan saja didasarkan kepada ilmu, keahlian dan ketrampilan yang sejenis, tetapi juga karena sama-sama mempunyai landasan etis dan filosofis yang sama, yang bercorak universal.

Kalau dikatakan bahwa ketenagaan museum dapat diberi corak khusus karena profesi dan ilmu serta keahlian sejenis, maka koleksi museum juga dapat diberi corak khusus karena terikat oleh kompleks segala cabang kesenian, ilmu dan teknologi, sebagai bukti-bukti material tentang kehadiran manusia dan lingkungannya. Sama halnya dengan manusia yang tidak pernah hidup sendiri, sebab tidak pernah ada museum yang koleksinya serba lengkap dan tuntas. Sekalipun museum itu merupakan museum umum yang berkaitan

dengan kegiatan studi semua cabang seni, ilmu dan teknologi, tidak pernah ada yang mempunyai koleksi yang berorientasi mempunyai koleksi bukti material manusia dan lingkungannya. Di dalam kenyataannya, definisi tentang museum itu, mencerminkan keadaan museum yang ada di seluruh dunia dan dalam konteks arti, tugas dan fungsi-fungsinya. Apalagi bila diambil contoh pada museum-museum khusus, yang koleksinya dibatasi pada salah satu cabang atau ranting saja dari sekian banyak cabang seni, ilmu dan teknologi.

## 2. Sistem Museum

Untuk mempertajam pengertian tentang sistem museum, perlu dianalisis tiga komponen utama di museum yang satu sama lain saling berkaitan. Komponen-komponen yang dimaksud adalah tenaga, koleksi dan publik museum. Pada umumnya dapat dilihat hubungan fungsional yang akrab antara tenaga dengan koleksi museum. Baik yang menyangkut kegiatan pengumpulan, registrasi, katalogisasi, studi dan riset, perawatan, perbaikan, dan kegiatan presentasi dan pameran koleksi, maupun yang berkaitan dengan pelbagai cara pemberian informasi kepada publik museum. Tetapi, hubungan-hubungan yang akrab antara koleksi dengan publik museum sebegitu jauh belum banyak disinggung. Dengan demikian, sepintas lalu dapat dilihat hanya adanya hubungan satu arah saja antara museum dengan publiknya. Tenaga museum menyiapkan koleksi museum untuk berkomunikasi dengan publik museum, dengan cara mengumpulkan sebanyak mungkin bahan informasi mengenai koleksi dan melalui pameran terjadilah jalur komunikasi. Tetapi jalur komunikasi tersebut masih bersifat satu arah, sebab belum dilakukan penelitian mengenai segala hal ihwal yang berkaitan dengan publik museum itu sendiri. Ibarat hidangan yang disajikan di meja oleh tuan rumah tanpa terlebih dulu menjajagi keinginan dan selera atau keperluan yang akan melahap hidangan tersebut.

Hal ini sengaja dikemukakan, karena dalam definisi tentang museum itu tercantum kata-kata: melayani masyarakat dan perkembangannya (in the service of society and for its development). Memang secara normatif pesan tersebut relevan dengan pesan yang juga ada dalam Undang-Undang Dasar 1945, antara lain untuk meningkatkan kecerdasan bangsa. Tetapi museum-museum kita belum pernah melakukan pengkajian yang sistematis dan terarah mengenai publik sebagai masyarakat pengunjungnya.

Uraian di atas tersebut sengaja dikemukakan, dengan maksud agar yang

difahami bukan sekedar adanya pelbagai komponen dalam sistem museum itu saja, tetapi harus juga berusaha agar komponen-komponen itu benar-benar berfungsi dan satu dengan yang lain saling berhubungan dengan akrab.

### 3. Sistem Permuseuman

Dengan sendirinya sistem permuseuman berlainan dengan sistem museum. Dalam sistem permuseuman terlihat adanya struktur jaringan yang terdiri dari berbagai komponen, antara lain komponen-komponennya terdiri dari beberapa museum yang satu sama lainnya berhubungan akrab karena masing-masing komponen seakan-akan mempunyai fungsi-fungsi yang sifatnya saling mengisi dan komplimenter. Dan karena sistem dan jaringan kerja antar komponen itu seakan-akan dijiwai oleh semangat yang sama. Mungkin saja faktor dinamikanya itu terdapat dalam komponen yang bukan museum, tetapi mungkin juga terdapat faktor dinamik komplementer yang terdapat di antara museum dalam struktur dan jaringan kerja sistem tersebut.

Sebagai contoh yang baik mengenai suatu gambaran struktur dan jaringan kerja permuseuman, dapat diketengahkan sistem permuseuman di DKI Jakarta. Bila dilihat dari segi koleksi, maka apa yang dinamakan “bukti material manusia dan lingkungannya” itu baru dinyatakan lengkap bila semua unsur bukti material manusia dan lingkungannya itu diwakili oleh segenap komponen atau museum-museum yang ada; mulai dari Planetarium Jakarta, disusul dengan Oceanorium Ancol, Kebun Binatang Ragunan, sampai kepada Museum Nasional dan museum-museum khusus lainnya, seperti Museum Bahari, Museum Tekstil, dan pelbagai museum sejarah yang ada (Museum Kebangkitan Nasional, Museum Sumpah Pemuda, Gedong Joang 45, Museum ABRI Satria Mandala, Museum Sejarah Tugu Nasional dll). Sedangkan komponen-komponen pembina permuseuman terdapat pula di DKI Jakarta, baik tingkat pusat, maupun tingkat daerah. Masalahnya sekarang bahwa di dalam kerangka sistem sudah terdapat komponen-komponen yang dapat merupakan faktor-faktor dinamik yang positif, namun jaringan kerja antar komponen pembina dan komponen-komponen pelaksananya, masih memerlukan kegiatan-kegiatan yang lebih meyakinkan adanya hubungan-hubungan fungsional yang lebih akrab dan dinamis.

Dikaitkan dengan museum-museum yang ada sebagai sistem yang bersifat mikro dan kerangka sistem permuseuman yang bersifat makro, maka

kembali perlu dikemukakan peranan yang dapat dimainkan oleh unsur-unsur tenaga, koleksi dan publik museum. Potensi yang ada masih perlu dikaji bersama dan secara menyeluruh dan terpadu perlu diadakan kegiatan-kegiatan administratif, teknis, sosial, edukatif dan kultural yang terarah. Suatu program kerjasama ke arah peningkatan kegiatan teknis fungsional di dalam kerangka sistem dan jaringan kerja permuseuman di DKI Jakarta perlu segera dipikirkan dan disusun. Sebab, bagaimanapun juga DKI Jakarta akan tetap menjadi titik pusat perhatian dari pelbagai daerah dan wilayah di seluruh tanah air Indonesia. Dan di dalam cara pembinaan, faktor keteladanan dan kepemimpinan merupakan cara yang terbaik. Tetapi keadaan masih menunjukkan banyak kelemahan dan hambatan.

#### **4. Pembinaan Sistem Pemuseuman**

Dalam konstalasi dan sistem administrasi negara yang berazaskan hukum, maka sebaiknya pembinaan sistem permuseuman dilakukan melalui sistem hukum dan perundang-undangan.

Tetapi, di samping pembinaan sistem permuseuman secara yuridis formal, perlu pula disadari bersama bahwa pembinaan suatu sistem permuseuman, dapat berjalan lancar bila komponen-komponen penggerakannya dapat melakukan pembinaan dari dalam dengan dibekali semangat persatuan, keakraban dan keterbukaan, karena sadar akan pesan-pesan yang harus dilaksanakan, sadar akan adanya dasar dan tujuan pengabdian yang sama sasarannya.

(Makalah pada Temukarya Sistem Permuseuman DKI Jakarta bagi kepala-kepala museum de DKI Jakarta, 8 s.d. 10 Nopember 1984)

# MUSEOLOGI SEBAGAI INSTRUMEN BAGI PENGELOLAAN PROYEK PERMUSEUMAN

## 1. Museologi dan Ruang Lingkupnya

Tanpa menyinggung persoalan disput antara para ahli permuseuman tentang museologi sebagai ilmu yang mandiri, kenyataan yang ada cukup meyakinkan, bahwa (a) ICOM (The International Council of Museums), dalam konperensi umumnya yang ke-11 di Moskwa, tahun 1976, telah memutuskan untuk mendirikan suatu komite internasional yang baru yang disebut ICOFOM (=International Committe for Museology); (b) bahwa sebelum isu museologi dijadikan bahan pembahasan oleh ICOM pada tahun 1971, atas desakan para ahli permuseuman yang berasal dari Amerika Latin, telah disepakati rumusan mengenai museologi sebagai “the science of museums”, dan bertugas “to study the history of museums, their role in society, methods of research, conservation and organisation, relations with the physical environment and typology”. Kemudian dengan museography dimaksudkan sebagai pelbagai “museum techniques”.

Salah kaprah ini benar-benar dikiprahkan di Amarika Latin, sebab setiap museum besar kemudian memiliki suatu “department of museography” yang maksudnya ialah bagian yang melakukan kegiatan teknis permuseuman untuk konservasi dan presentasi koleksi museum. Kenyataan ini dapat dilihat di Mexico terutama pada tahun 1968 (kunjungan pertama penulis ke Mexico) bahkan pada tahun 1979 (kunjungan kedua) hal inipun masih berlaku. Juga Department of Museum Studies di negara-negara Anglo Amerika masih tetap berpegang pada arti museografi yang salah kaprah itu. Berlainan halnya dengan pendapat Prof. Van den Houte (Belgia), Prof. Sochiro Tsuruta (Jepang) dan penulis secara pribadi menganggap, bahwa museography dan museology dapat dianalogikan dengan pengertian atau istilah ethnography dan ethnology. Museography adalah monografi-monografi yang diskriptif tentang pelbagai museum yang ada, sekalipun sifat uraiannya historis-sosiologis, dan merupakan sumber informasi bagi museology yang sifatnya komparatif dan analitis yang bertujuan mengembangkan pelbagai teori serta menemukan pelbagai kaidah bagi sekian jenis kegiatan museum, untuk kemudian diuji penterapannya dalam penyelenggaraan dan pengelolaan praktis di museum-museum yang memerlukannya. Dengan demikian maka karakteristik museologi adalah: (a) empiris, karena pengembangan pelbagai

teori berasal dari proses pengkajian dari kenyataan-kenyataan dalam praktek dan (b) normatif, karena pengembangan teori-teorinya adalah demi penyempurnaan kegiatan-kegiatan praktis.

museologi : pengembangan pelbagai teori dengan metode kajian komparatif-analitis.

museografi : diskripsi-diskripsi mengenai pelbagai tipe museum atau mengenai sejarah perkembangan dan peranan museum-museum di satu wilayah kajian tertentu.

Di samping itu, ada juga yang membagi museologi menjadi: museologi umum (general museology) dalam pengertian the science on museums seperti yang telah disebutkan, museologi khusus (specialized museology) yang merupakan spesialisasi lebih lanjut, dengan mengambil aspek atau fokus tertentu dari pada museum sebagai lembaga sosial-edukatif-kultural, dan museologi terapan (applied museology), yakni penterapan pelbagai teori atau kaidah yang telah dihasilkan oleh kajian museologi umum atau museologi khusus.

Karena sifat museologi yang empiris itu, maka dapat digambarkan siklus proses kajian dengan penterapannya sebagai siklus deduksi dan induksi dari kenyataan praktis ke pengembangan teori, sampai ditemukannya pelbagai kaidah yang kemudian diterapkan lagi pada kegiatan praktis.

Sebagai misal yang pertama, perlu ditelaah definisi museum menurut Statutes of ICOM. Sekalipun definisi tidak sama dengan konsepsi, namun tidak dapat diingkari, bahwa definisi tentang museum itu telah mengalami perubahan. Definisi tentang museum itu sendiri sebetulnya banyak, seperti halnya definisi tentang kebudayaan. Definisi yang dirumuskan oleh ICOM sebelum tahun 1974 (10th General Assembly of ICOM di Copenhagen) tidak sama dengan definisi yang dibuat tahun 1974. Perubahan definisi tentang museum adalah hasil perumusan para ahli yang telah melakukan kajian dan telah mengungkapkan konsepsi-konsepsi mereka tentang arti dan fungsi museum. Sekalipun arti dan fungsi museum seperti yang tersurat dan tersirat dalam definisi itu merupakan hasil pemikiran yang konsepsional, namun sifatnya masih tetap abstrak. Lebih bersifat filosofis dari pada cerminan realitas. Orang berusaha supaya konsepsi-konsepsi filosofis itu menjadi realitas. Realitasnya museum-museum yang ada secara tipologis justru menunjukkan kesamaan penjenisan cabang-cabang seni dan ilmu, misalnya

dalam kenyataan - yang sebenarnya belum murni sebagai kenyataan - museum-museum itu dapat dibagi menjadi:

- (a) museum ilmu hayat (museums of natural history);
- (b) museum ilmu dan teknologi (museums of science and technology);
- (c) museum arkeologi dan sejarah (museums of archaeology and history);
- (d) museum antropologi dan etnografi (museums of anthropology and ethnography);
- (e) museum kesenian (museums of art).

Penjenisan museum-museum tersebut, dalam kenyataan masih bersifat umum dan masih dapat dipecah-pecah menjadi museum-museum yang lebih khusus. Sebagai contoh, Museum ABRI Satriamandala di Jakarta merupakan suatu museum sejarah, tetapi mengkhususkan dirinya pada pengumpulan, pemeliharaan, pencatatan, kajian, dan mengkomunikasikan relik-relik (bahan pembuktian) sejarah ABRI. Contoh lain yang lebih khusus dari yang khusus lagi ialah Museum Sasmitaloka Achmad Yani di Jakarta. Museum ini merupakan suatu museum memorial, yang mengkhususkan dirinya pada preservasi dan presentasi benda-benda yang berkaitan erat dengan peristiwa tragis G 30 S/PKI terhadap almarhum Jenderal Achmad Yani. Demikian pula halnya dengan Museum Kirti Griya Ki Hadjar Dewantara di Yogyakarta yang secara tipologis merupakan suatu museum memorial dan berkaitan erat dengan riwayat hidup almarhum Ki Hadjar Dewantara. Mulai dari pekarangan rumah kediaman sampai kepada setiap benda yang ada di dalam rumah, dibiarkan terpelihara dan tersajikan sebagaimana adanya untuk mengenang almarhum Ki Hadjar Dewantara. Jadi apa yang disebut “museum sejarah” dapatlah dikatakan suatu “nomen collectivum”, bukan cerminan fakta tetapi kumpulan fakta. Dari pelbagai fakta dan diskripsinya, dapat ditarik kesimpulan adanya suatu tipe museum yang koleksi dan pemanfaatannya berkaitan erat dengan disiplin sejarah. Lain halnya dengan Museum Tekstil di Jakarta. Dilihat dari metode pengumpulan dan presentasi koleksinya, museum tersebut mengikuti metode disiplin sejarah dalam pengertian sejarah pertekstilan, untuk itu maka ia dapat dikelompokkan ke dalam tipe museum sejarah khusus di bidang industri dan teknologi. Tetapi tekstil itu sendiri merupakan suatu benda yang sifatnya sangat manusiawi yang pada dasarnya sudah melekat pada tubuh manusia, maka kemudian orang menarik kesimpulan bahwa sesungguhnya semua jenis museum yang ada di dunia

ini, terlepas dari latar belakang mulajadinya, adalah merupakan suatu lembaga yang bertugas mengumpulkan, memelihara, mengkaji dan mengkomunikasikan, segala benda pembuktian manusia dan lingkungannya, seperti yang tersurat dalam definisi museum menurut ICOM (definisi tahun 1974).

Kalau penjenisan museum dihubungkan dengan museologi sebagai ilmu tentang museum, maka dalam ruang lingkup museologi, harus diperhitungkan aspek lain yang sangat penting, yakni: hubungan museum dengan penjenisan ilmu di satu pihak dan hubungan museologi dengan penjenisan ilmu di lain pihak. Ini berarti kaitan koleksi museum dan penanganannya hanya dianggap sah bila didasarkan pada penggarapannya menurut disiplin ilmu yang ada, dan pelbagai teknik yang dilahirkannya. Selain itu, penanganan museum hanya dianggap sah bila ditangani menurut dasar dan hubungan disiplin ilmu yang bertautan dengan koleksi, dan penanganannya berdasarkan prinsip-prinsip museologi.

Untuk lebih memperjelas pengertian di atas, ilmu kedokteran dapat dipakai sebagai analogi. Ilmu kedokteran bukan ilmu murni, seperti halnya biologi, kimia, antropologi, dan fisika. Obyek studi ilmu kedokteran ialah manusia yang diserang oleh penyakit dan bagaimana upaya penyembuhannya. Untuk itu seorang calon dokter harus menguasai ilmu tentang manusia dan ilmu tentang penyakit. Ilmu tentang manusia, meliputi: biologi, antropologi ragawi, anatomi (ilmu urai), ostiologi (ilmu tulang), miologi (ilmu otot), fisiologi (ilmu faal) dan sebagainya. Sedangkan ilmu tentang penyebab penyakit dapat dipelajari dari bakteriologi, virologi dan sebagainya. Seorang calon dokter dituntut kemampuannya untuk dapat mempelajari secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan ilmu murni seperti halnya biologi dan kimia, dan juga ilmu terapan seperti misalnya ilmu farmasi.

Demikian halnya dengan hubungan ilmu murni dengan museologi. Seorang kurator museum ilmu hayat, seharusnya adalah ahli atau sarjana biologi. Atau spesialis di bidang biologi seperti misalnya zoologi dan cabang-cabangnya yang meliputi: ornitologi (ilmu tentang unggas), ichtiologi (ilmu tentang ikan) dan sebagainya.

Dalam kompleks biologi terdapat ilmu tumbuh-tumbuhan, dan di sana dapat dilihat bahwa "museum botani" ada dua macam. Yang khusus mengumpulkan pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan (flora) sebagai koleksi hidup dinamakan hortus botanicus (Kebun Raya Bogor), dan yang lainnya khusus mengumpulkan koleksi yang mati dan diawetkan disebut herbarium (Herbarium Bogori-

ensis, diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). Tetapi karena kurator itu juga mengelola koleksi museum, maka untuk kegiatan-kegiatan yang khas permuseuman, seperti misalnya pengelolaan, pengumpulan dan pendokumentasian, pencatatan, pengkajian, pemeliharaan, pengkomunikasian, presentasi, edukatif, dan hubungan masyarakat, maka museologi merupakan ilmu yang harus dikuasai di samping ilmu hayat yang telah diperoleh dari almaternya.

Dalam mengemukakan contoh ini sengaja dipilih bidang biologi dan hubungannya dengan ilmu hayat, karena seorang biolog adalah benar-benar seorang scientist, dalam pengertian ia mempelajari gejala-gejala alamiah berupa fauna dan flora, berhadapan langsung dengan realia natural, bukan dengan tingkah laku atau perilaku manusia yang menjadi obyek kajian antropologi atau psikologi sosial. Seorang biolog dapat mengkaji obyek fauna dan flora baik dalam keadaan hidup di hutan belantara maupun dalam keadaan mati yang tersimpan di herbarium. Jika biolog itu ingin menjadi seorang kurator museum zoologi yang baik, maka ia harus pandai dalam hal bagaimana menyampaikan pelbagai bahan informasi mengenai dunia fauna itu kepada publik museumnya. Sebab tugas setiap museum adalah: A (a) acquires, (b) conserves; (c) researches; (d) communicates dan (e) exhibits .... material evidences of man and his environment. B. in the service of society and of its development; C. for purposes of study and enjoyment; sehingga bekerja di museum bagi seorang biolog atau zoolog (yang bekerja di museum zoologi), tidak sama dibanding dengan apabila biolog dan zoolog itu bekerja sebagai peneliti saja. Biolog peneliti berkomunikasi dengan jalan mengumumkan hasil penelitiannya kepada dunia ilmu biologi, atau bisa dengan jalan menerbitkan karangan-karangan yang bersifat ilmiah populer yang dapat juga sebagai konsumsi bagi kalangan non-biologi atau peminat biologi. Tetapi untuk mengkomunikasikan koleksi museum zoologi, seorang zoolog yang menjadi kurator museum harus belajar museologi, sebab pengetahuan untuk hal itu tidak terdapat dalam kurikulum dan silabus biologi di fakultasnya.

Dalam museum-museum ilmu hayat, atau museum zoologi misalnya, cara yang digunakan untuk mempresentasikan koleksi fauna yang diopset maupun untuk mengkomunikasikan sejenis binatang liar kepada publik museum, banyak menggunakan diorama. Di dalam diorama tersebut dipasang sejenis binatang yang diopset dengan latar belakang lingkungan hidupnya dan tidak jarang pula diperlihatkan adegan yang menarik, misalnya sikap binatang yang sedang menerkam mangsanya, sikap sedang bercumbu dan

sebagainya. Adegan kehidupan fauna dalam tatanan presentasi lewat diorama sifatnya lebih komunikatif jika dibandingkan dengan cara pameran yang statis, seperti misalnya penempatan suatu binatang yang diopset dalam vitrin biasa tanpa lukisan latar belakang lingkungan hidupnya.

Demikian pula halnya dengan seorang sarjana geologi yang bekerja sebagai kurator di museum geologi. Pada saat masih menjadi mahasiswa geologi, ia sudah terbiasa dengan meneliti koleksi batuan dan mineral yang ada di museum geologi. Ia sudah terbiasa berkomunikasi dengan obyek studinya, bahkan ia telah mengkomunikasikan hasil penelitiannya kepada kawan-kawan sesama calon geolog di dalam maupun di luar negeri, melalui media cetak, majalah atau jenis penerbitan lainnya yang memang sudah tersedia. Tetapi, ketika ia ditugaskan sebagai kurator Museum Geologi, maka ia harus menambah satu bidang keahlian dan keterampilan yang tidak ada dalam kurikulum dan silabus geologi di ITB misalnya, yakni museologi. Di museum geologi tersebut ia berhadapan dengan banyak siswa dari pelbagai sekolah, baik di Bandung maupun dari kota-kota lainnya. Para siswa tersebut ingin lebih banyak mengetahui masalah gempa bumi, masalah isi perut bumi dan sebagainya yang kesemuanya perlu dijawab secara benar dan tepat.

Cara pelayanan museum untuk para mahasiswa dan kepada para siswa sekolah dasar dan sekolah menengah, tidak boleh sama. Mahasiswa dapat secara agak bebas memanfaatkan fasilitas koleksi studi, tetapi untuk para siswa dan pengunjung umum, Museum Geologi harus dapat mengkomunikasikan koleksinya dengan media pameran yang tepat, seperti halnya di Science Museum di kota London (kota yang tidak pernah mengalami gangguan gempa bumi). Di museum ini disediakan sebuah ruangan khusus yang bukan saja memperlihatkan pelbagai diorama yang menggambarkan pelbagai gunung api, struktur tubuhnya, lapisan bumi dan keraknya, tingkah-polah dalam keadaan aktifnya, tetapi juga peragaan gempa bumi dengan cara menggerakkan lantai berpijak dengan diiringi tiruan suara gemuruh letupan gunung berapi disertai kelap-kelip permainan sistem pencahayaan. Kesemuanya itu merangsang imajinasi para pengunjung remaja dan membawa kepada suasana seperti yang sesungguhnya.

Di pelbagai museum khusus yang tipenya telah dikemukakan di atas, penyajian tentang "material evidence of man and environment" belum digambarkan secara utuh dan menyeluruh. Untuk itu sebelum meningkat ke pembicaraan tentang museologi sebagai instrumen pengelolaan proyek atau

pengelolaan museum terlebih dulu akan diketengahkan skema hubungan antara museum, disiplin ilmu dan museologi di samping hubungan antara *man* dengan *environment* dan pelbagai ungkapan hasil interaksi antar keduanya itu.



Masyarakat dan kebudayaan adalah ibarat mata uang yang satu sisinya berupa ungkapan sistem-sistem sosial dan sisi yang lain merupakan ungkapan sistem budaya, baik yang abstrak (sistem nilai) maupun yang konkrit (*tangible cultural property; cultural materials*).

Segala cabang kesenian dan ilmu sebagai hasil karya manusia akibat dari interaksi dengan lingkungan hidup, itu juga merupakan salah satu aspek kebudayaan. Di dalam antropologi terdapat istilah “the seven cultural universals” atau tujuh aspek kebudayaan yang secara universal dapat diamati kehadirannya di setiap masyarakat atau kebudayaan bangsa mana pun juga. Mengenai apa yang disebut “ilmu” memang ada perbedaan ungkapan dan proses perkembangannya. Tetapi asalmula dari ilmu itu sendiri adalah merupakan hasil pengamatan manusia tentang lingkungan hidupnya, termasuk tentang dirinya sendiri, sampai ke hal-hal yang bersifat mitologi dan falsafah hidup. Kadang-kadang antara penalaran (*kennis, knowledge*) dibedakan dengan ilmu (*wetenschap, science*), dan bagi masyarakat berkebudayaan etnik dengan tahapan kemampuan teknologi prehistorik, lingkup dan khasanah penalaran atau pengetahuannya akan terbatas, dan berkembangnya pun melalui proses yang hampir tidak berubah sepanjang jaman kalau terdapat sikon isolemen. Hasil teknologinya juga berkembang lamban. Namun hasil pemikiran mereka tentang lingkungan alam, tentang pelbagai jenis fauna dan flora, sangat menakjubkan. Seorang anggota suku Dayak Ngaju di pedalaman hutan Kalimantan, mengetahui secara pasti pohon apa yang getahnya beracun dan jenis pohon apa yang tidak beracun dan aman untuk dijamah. Ini merupakan suatu bukti bahwa sebenarnya mereka mengetahui tentang “ilmu hayat”, karena ternyata mereka mengetahui tentang fauna dan flora di lingkungan pemukimannya dan mereka memberi nama atas setiap species dengan bahasa mereka. Hanya pengetahuan tersebut belum disusun dan diatur dalam

bentuk sesuai dengan metodologi yang ilmiah atau “scientific”, karena di lingkungan mereka belum ada suatu sistem klasifikasi a la Linnaeus atau karena belum ada orang Ngaju menjelma menjadi seperti seorang tokoh seperti Charles Darwin dan Wallace.

Jauh sebelum museologi mendapatkan tempat di kalangan ICOM dengan membentuk komite internasionalnya yang khusus (ICOFOM), AC Parker seorang tokoh permuseuman dari Amerika Serikat menyatakan bahwa “the main task of every museum is to interpret the world of man and nature”. Ucapan Parker itu tidak jauh dari apa yang tersurat dalam definisi ICOM tentang museum. Namun yang menarik di sini adalah bila ditelusuri perkembangan museum dan pembentukan konsep-konsep museum yang mutakhir ini, dilihat dari segi “ethnomuseologi”, yakni kecenderungan banyak pemikir dan pengambil keputusan di bidang permuseuman, untuk mendirikan dua jenis museum, yakni: (a) museum umum, atau “the integrated museum”; dan (b) museum lingkungan hidup, atau “the eco museum”.

Sebagai pegelola proyek permuseuman, sudah disepakati bersama bahwa dalam pembinaan permuseuman ini yang harus dibina adalah sistemnya. Di setiap propinsi komponen utamanya ialah museum negeri tingkat propinsi. Sejak penulis berkesempatan mewujudkan gagasannya dalam pembinaan sistem permuseuman, maka sejak itulah ia berpegang kepada perlunya komponen utama itu diberi bentuk suatu museum umum: integrated museum, yang bentuk, isi, serta kegiatan-kegiatannya sangat relevan dengan falsafah museum seperti yang tersirat dalam rumusan ICOM tentang definisi museum. Jauh sebelum kalangan ICOM mendiskusikan apa yang dimaksud dengan “integrated museum”, di Indonesia sudah dimulai pembangunannya. Hanya disayangkan bahwa banyak pemimpin proyek pada saat itu kurang mendalami pemikiran-pemikiran historis-antropologis apalagi etno-museologis, padahal penulis melalui pelbagai tulisan yang dimuat dalam majalah *Museografia* mengungkapkan seperti misalnya tentang perlunya suatu “survai etno-museografis” yang mendahului penyusunan rencana induk pembangunan museum propinsi. Di sinilah pentingnya pengertian mengenai “integrated museum” itu perlu lebih disebarluaskan.

Untuk lebih memahami tentang “*integrated museum*”, di bawah ini diketengahkan kutipan panjang dari Keneth Hudson: *Museum for The 1980's. A Survey of World Trends* (1977: 15-16), sebagai berikut:

“The Integrated Museum.

This phrase, “the integrated museum” is the key to the new approach. The integration refers to the museum’s public activity, to realisation that it exists to meet the needs of people, not merely to preserve what the French call the *patrimoine*, the national cultural heritage. In order to achieve this, certain time honoured practices will have to go. As a former Director-General of ICOM, Mr Hugues de Varine-Bohan, has recently said, “It is necessary to break down old-established barriers between museums and research institutes, break down the psychological and hierarchical barriers between museum themselves. What has to be done is to organise systematically, and on all levels, co-operation.”

What integration and co-operation mean, in museum terms, has been admirably illustrated by one of the greatest and most flexible minded of all museologists, the ever-young George Henri Riviere, in his plan for the Museum of Negro Civilization at Dakar, a museum which is planned, it should be noted, to include nothing later than the eve of colonial period. It is to be, one might say, not only a Museum of Negro Civilization, but a Museum of Negro Civilization underfield, which is something rather different. To create the kind of museum which would justify the enormous investment of money and talent that is envisaged, Mr Riviere envisages a fusion of seven disciplines or, as he prefers to call them, approaches - anthropological, ecological, techno-economical, sociological, ideological, aesthetic and historical. Museology worthy of the name must, he believes, now embrace and show itself capable or absorbing all these different ways of looking at human activity. This is what the much-misused, but still useful word “inter-disciplinarity” means, and there can be no doubt that now, in 1977, museology which does not draw its nourishment from as wide a range of disciplines as possible will quickly wither and die away.

Kalau melihat museum umum tingkat propinsi yang sudah selesai pembangunan fisiknya dan sudah mulai berfungsi, atau kalau melihat rencana dan pelaksanaan pembangunan fisiknya melalui proyek-proyek permuseuman, itu semua adalah suatu “*integrated museum*”. Dalam melihat hal ini jangan kita terpujau oleh sarana proyek yang bersifat perangkat keras, atau oleh standardisasinya, tetapi yang perlu diingat adalah bahwa kalau pada saatnya nanti

suatu museum itu berfungsi maka perlu dipikirkan perencanaan jangka menengah dan jangka panjangnya mengenai perangkat lunak (soft ware), yakni rencana pengisian (collecting policy) dan rencana pengkomunikasian isi atau koleksinya kepada publik pengunjung sebagai lingkungan museum itu sendiri.

Untuk perencanaan jangka menengah lainnya, proyek yang dikelola harus sudah memikirkan dan membuahkan rencana induk mengenai pelbagai ungkapan kebudayaan etnik yang tergabung dalam kelompok satuan hunian sebagai monumen etnografi untuk dijadikan museum terbuka (open air museum) atau suatu museum lingkungan (eco-museum), sebab pengembangan dan fungsionalisasinya juga termasuk lingkup kegiatan proyek permuseuman di setiap propinsi.

## 2. Ethno-Museology

Dengan memahami bahwa berfungsinya museum adalah bukan karena usaha kegiatan preservasi dan registrasi saja, tetapi bagaimana memanfaatkan koleksi museum yang merupakan suatu seri perangkat kegiatan, mulai dari field-collecting (field case) sampai kepada usaha kegiatan komunikasi dan presentasi koleksi (show-case). Untuk rangkaian kegiatan itu, diperlukan tenaga-tenaga yang berkeahlian dan terampil di bidangnya masing-masing.

Karena museum-museum kita itu bercorak integrated-museum maka jelas, bahwa pendekatan interdisipliner sangat diperlukan. Untuk itu, kerjasama antar ilmu dengan pihak Kampus setempat dengan pelbagai instansi vertikal-sektoral setempat, adalah merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan fungsionalisasi suatu museum di propinsi. Hal ini berbeda dengan museum-museum khusus tingkat nasional yang berserakan di kota metropolitan, yang juga merupakan suatu sistem, tetapi diintegrasikan bukan isi dan kegiatan fungsionalisasinya, melainkan perencanaan program-program kegiatannya. Namun demikian, salah satu cabang museologi yang dapat membantu para kepala museum untuk menyusun pelbagai program kegiatannya, sebagai instrumen bagi pengelolaan museumnya, ialah ethno-museologi.

Sudah dipahami bersama, bahwa museum umum tingkat propinsi baru akan berperan di tengah-tengah masyarakat lingkungannya, jika setiap kali

berkomunikasi melalui media pameran semi permanen atau pameran-pameran temporer senantiasa “berkenan” dihati para pelanggannya. Dari ceramah-ceramah Dr Van Wengen kita telah mendengar tentang pelbagai usaha agar museum kita senantiasa memiliki attractive and holder power. Kekuatan gaib ini adalah usaha keahlian dan keterampilan yang harus dimiliki oleh staf ilmiah dan staf teknis dan edukatif setiap museum. Tetapi, faktor dinamik yang menimbulkan pelbagai gagasan untuk program - program kegiatan pameran dan bimbingan edukatif kultural, ialah dikuasainya dan dimanfaatkannya etno-museologi oleh pengelola museum atau pengelola proyek.

Tidak mungkin kita dapat memahami “karakteristik” sosial-budaya lingkungan kita jika kita tidak pernah melakukan kajian ethnografi atau antropologi budaya dengan metode pendekatan (a) interdisipliner dan (b) sinkronis dan diakronis, serta jangkauan penguasaan hasil kajiannya bagi program kegiatan museum, (c) museologis, apalagi untuk menjadi tanggap dan tangkas terhadap setiap peristiwa aktual di sekitar kita. Memang sulit untuk membuat museum itu menjadi museum yang hidup, apalagi membuat museum yang “lincah” berdendang seirama dengan masyarakat lingkungannya. Diperlukan penghayatan falsafi tentang dasar dan tujuan penyelenggaraan dan pengelolaan museum yakni: sikap harus berorientasi kepada kepentingan publik, memahami karakteristik sosial budaya daerah, up to date dengan segala hal yang aktual bagi masyarakat lingkungannya.

Sebelum lebih jauh dijelaskan tentang apa sebenarnya etno-museologi itu, perlu diketahui bahwa pengertiannya adalah bukan ilmu etnologi museum atau antropologi museum (museum ethnology atau museum anthropology adalah ethnology atau anthropology yang khusus diterapkan oleh kurator museum dalam hal riset lapangan, pengumpulan koleksi, pendokumentasian verbal, visual dan auditif, serta grafis, yang merupakan kombinasi perangkat kegiatan kuratorial, yang nantinya akan membantu perangkat kegiatan presentasi dan edukasi koleksi antropologi, di samping cara pelaporan informasi melalui media cetak atau ceramah). Untuk itu sebaiknya kita melihat dua contoh dari luar. Contoh-contoh lainnya, khususnya bagi India dan beberapa negara Afrika dapat dipelajari dalam buku Keneth Hudson tersebut di atas.

Sebagai contoh pertama, ialah kasus di Mexico. Wilayah Mexico di jaman Pra-Columbus adalah wilayah budaya orang Indian Aztek yang sudah berperadaban kuno yang tinggi, megah meriah dengan bangunan-bangunan piramida dan pusat-pusat ritual kerajaan dan keagamaan. Teotihuacuan,

Palengke, dan lain-lain tempat peninggalan kebudayaan Aztek, kini menjadi kebanggaan Republik Mexico, yang penduduknya terdiri dari keturunan Indian asli, keturunan Spanyol asli dan keturunan hasil pembauran Ero-Indian yang disebut orang-orang Meztizo. Orang-orang Mexico, menyadari pembebasan mereka setelah melepaskan diri dari Empirium Spanyol, kemudian merasa memerlukan dasar tempat berpijak sendiri. Mereka mencari kepribadian bangsa Mexico, yang penduduknya terdiri dari tiga unsur ras kebudayaan tersebut. Mereka mendambakan suatu perasaan kebanggaan nasional. Maka berdirilah INAH (Instituto Nacional de Antropologia et Historia), yang langsung bertanggungjawab kepada Presiden Republik Mexico. INAH kemudian melakukan kegiatan eskavasi, riset, pengumpulan, pendokumentasian, restorasi, dan mengembangkan pelbagai teknik presentasi peninggalan sejarah dan kepurbakalaan, baik dari budaya Indian Pra-Columbus, Post-Columbus, maupun dari budaya kolonial dan budaya Mestizo. Juga INAH membenahi sistem permuseuman, dan puncak prestasi INAH ialah pada saat diresmikannya Museo Nacional de Antropologia, terletak di Bosque de Chapultepeque, Mexico DF. Serentak dengan kegiatan penggalian kepribadian itu maka muncul pula kelompok sarjana dan seniman, arsitek dan para perancang lainnya, menghasilkan berbagai karya tulis, karya seni, yang berpretensi menghembuskan nafas kepribadian Mexico Baru. Bermunculan Nama-nama seperti Miguel Covarobias, pelukis-antropolog yang antara lain terkenal karena bukunya dengan judul *The Island of Bali*, dan lain-lain. Di bidang permuseuman dan museologi, Mexico yang pernah menjadi tuan rumah simposium arsitektur museum (1963) dan tuan rumah General Conference ICOM yang ke-12 (1979) bagi wilayah kawasan budaya Amerika Latin tidak boleh diremehkan begitu saja. Tegasnya, pembinaan dan pengembangan permuseuman di Mexico telah dirancang sesuai dengan hasil kajian etnologis dan museologis, atau kajian etno-museologis.

Contoh yang lain, ialah Jepang. Di atas puing-puing bekas perang dunia kedua, bangsa Jepang telah bangkit kembali dan faktor-faktor dinamik intern dan ekstern telah dimanfaatkan oleh Jepang untuk menjadi suatu kekuatan teknologi, industri dan ekonomi adikuasa, sampai Jepang mendapat julukan the “economic animal”, di samping orang-orang Amerika yang sering kali disebut “the ugly American”. Tentu saja orang Jepang tidak mau disebut binatang ekonomi. Mereka kemudian melakukan otokritik. Maka di atas bekas pameran internasional EXPO di Osaka, sekarang ini telah berdiri Museum Nasional Etnologi, yang pola pengisian dan kegiatan risetnya

mengikuti pola Rijkmuseum voor Vulkankunde, Leiden. Dalam waktu yang relatif singkat (kira-kira 5 tahun), Jepang telah berhasil membangun gedung yang megah dan fungsional, menghimpun koleksi benda budaya dari wilayah budaya Asia, Afrika dan Amerika. Mereka mengirim tenaga-tenaga kurator dan antropolog melakukan riset lapangan dan sekaligus mengumpulkan benda-benda budaya bagi koleksi museumnya. Jepang yang sudah maju di bidang permuseuman dan pengembangan museologinya, memandang bahwa hubungan perdagangan dan industri antara Jepang dengan negara-negara lain perlu didukung oleh pengetahuan komprehensif mengenai latar belakang kebudayaan bangsa-bangsa dari negara-negara tersebut, untuk dapat dicegah sebutan “economic animal” bagi bangsa Jepang yang walaupun berwatak keras dan memiliki disiplin yang membaja, tetapi mereka mempunyai sistem etika pergaulan yang luwes dan berbudaya.

Dengan demikian maka para kepala museum dan para pemimpin proyek permuseuman di Indonesia, sangat perlu untuk melakukan studi wilayah secara mikro, artinya masing-masing melakukan kajian yang serius dan terarah mengenai sejarah dan etnografi kelompok-kelompok etnik yang menghuni wilayah propinsinya. Bukan sekedar memantapkan metode pengumpulan dan pendokumentasian koleksi benda budaya museum atau kegiatan proyeknya saja, tetapi juga dalam rangka menelusuri pelbagai obyek kajian dan menyingkap kabut misteri ungkapan simbolik dan berusaha memperoleh pelbagai ungkapan kehidupan sosial budaya yang karakteristik bagi wilayah etnik masing-masing. Sebagai contoh, kebudayaan air Kalimantan dan Kebudayaan air Sulawesi pasti berlainan, karena Kalimantan letak kekuatannya dalam nilai budaya rimba dan daratan yang luas, sedangkan pantai Sulawesi merupakan dasar-dasar ungkapan nilai budaya maritim. Maka pelbagai ungkapan kehidupan sosial budaya itu melalui komunikasi benda-benda budaya dengan media presentasi dan ekshibisi, dapat mengisi program-program semi permanen dan pameran-pameran temporer.

Sudah sering kita terpukau oleh pelbagai ungkapan bombastis yang disiratkan dan dicetuskan dalam kata-kata penghias “tema pameran”. Seringkali ungkapan tema-tema pameran itu sudah “bernafaskan” rutin, kurang mencerminkan jiwa atau semangat kreativitas personil museum. Bekerja di museum sama dengan bekerja di perguruan tinggi: riset, berfikir dan menciptakan pelbagai gagasan, yang kemudian dapat dijadikan masukan bagi pelbagai program kegiatan.

Sebagai penutup dari tulisan ini, ada baiknya kita kutip kata-kata mutiara dari almarhum Prof. DR. Nugroho Notosusanto, yang berbunyi: “Time is not money. Time is more than money. You may lost your money, but you may earn it back, soon or later. But if you lost time, you lost it forever... “.

Kegiatan di bidang permuseuman adalah merupakan kegiatan yang penuh amal, karena museum adalah lembaga yang senantiasa siap melayani masyarakat lingkungan dan untuk keperluan kemajuannya.

(Ceramah pada Rapat Konsultasi para pemimpin Proyek Pengembangan Permuseuman se Indonesia, Jakarta, 6-8 Juni 1985)



Auditorio Nacional di Mexico, tempat berlangsungnya Sidang Umum ke-12 ICOM tahun 1979.



Drs. Moh. Amir Sutaarga (Paling kanan) menghadiri Sidang Umum ke-12 ICOM di Mexico.



Museo Nacional de Antropologia di Bosque de Chapulteque Mexico, merupakan puncak prestasi INAH di Mexico.



Salah satu tata penyajian evokatif di Museo Nacional de Antropologia Mexico.

## DOKUMENTASI DAN INFORMASI BENDA BUDAYA

Istilah *natural materials* dan *cultural materials* adalah istilah-istilah yang seringkali dipergunakan di kalangan permuseuman untuk menunjukkan benda-benda koleksi museum.

Istilah *cultural materials* yang dipergunakan di sini sudah barang tentu tidak akan sama artinya dengan *cultural material* yang dipergunakan oleh misalnya Murdock dkk (1971) atau istilah *materials of culture* yang dipergunakan Herskovits (1949), yang menunjukkan arti bahan dan bukar benda. *Natural material* adalah benda alam dan *cultural material* adalah benda budaya. Kata kebudayaan material atau kata kebudayaan fisik, seperti yang dipergunakan oleh Prof. Koentjaraningrat (1979: 221) akan lebih banyak dijumpai dalam makalah ini.

Di dalam buku *Dictionary of Anthropology*, susunan Charles Winick (1961: 146) hanya dijumpai kata *non material culture*, yang dijabarkan sebagai “those elements of culture that are intangible”. Tetapi dapat ditarik kesimpulan, bahwa di samping *nonmaterial culture* tentunya ada *material culture*, yang dalam bahasa Indonesia diungkapkan dengan kata *kabudayaan material*.

Istilah *natural material* dan istilah *cultural material* memang seringkali digunakan di kalangan permuseuman sebagai suatu lembaga yang bertugas untuk mengumpulkan, mencatat, mengkaji, memelihara, memamerkan, mengkomunikasikan, setiap benda bukti material (*material evidence*) dari kehadiran manusia dan lingkungannya.

Istilah lain yang sering dipergunakan oleh kalangan permuseuman ialah istilah (*national, natural, cultural*) *heritage*, yang dalam bahasa Indonesia diungkapkan dengan kata *warisan budaya*. Dalam bahasa perencanaan istilah ini dikaitkan dengan salah satu program pembangunan kebudayaan nasional, yakni program penyelamatan warisan budaya.

Di dalam kegiatan operasionalnya, program penyelamatan warisan budaya menjadi tanggung jawab dua instansi yang manangani kebudayaan fisik di lingkungan Direktorat Jenbderal Kebudayaan dan dilaksanakan dalam bentuk proyek-proyek kepurbakalaan dan permuseuman.

Istilah *heritage* oleh Keneth Hudson dijabarkan sebagai “objects of cultural importance which have been handed down from the past” (1977:188). Istilah *cultural material* dan *cultural heritage*, akhirnya juga dipergunakan oleh

UNESCO, di samping istilah lainnya yakni cultural property (harta milik budaya).

Dari uraian di atas, dapat dicatat adanya dua komitmen, yakni (a) para ilmuwan yang bekerja di bidang permuseuman, sejarah dan keperbukalaan, yang menggarap benda budaya dengan landasan akademis; dan (b) para petugas yang menggarap benda budaya dengan landasan administrasi kebudayaan. Kedua macam komitmen itu menjadi pangkal bertolak dalam penyusunan makalah ini.

Studi mengenai benda budaya, jika dilihat dari pelbagai pengumuman hasil studinya lewat kepustakaan yang ada, ternyata belum mencerminkan kuantitas dan kualitas yang meyakinkan. Padahal, ketika Rademacher dkk pada tahun 1788 mendirikan Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, usaha kajian mengenai pelbagai ilmu tentang kepulauan Indonesia dan daerah-daerah sekitarnya itu, juga mencakup usaha pendirian sarana-sarannya, berupa sebuah museum dan perpustakaan (Sutaarga, 1957). Studi mengenai benda budaya lebih banyak dilakukan oleh para ahli arkeologi dan mereka yang bekerja di pelbagai museum. Sehubungan dengan hal ini, maka usaha Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah untuk melakukan dokumentasi benda budaya, seperti arsitektur dan pelbagai ungkapan sistem teknologi dan kesenian, patut disambut dengan perasaan gembira.

Selain itu, pernyataan mending Dr F.D.K. Bosch, dalam tahun 1935, mengenai proses pemiskinan budaya (*cultuurverarmings proces*) akibat proses akulturasi, dan gejala berjangkitnya “museum epidemie” di tahun-tahun duapuluhan, masih merupakan sinyalemen yang masih latent dan perlu ditanggapi secara wajar. Demikian, maka dalam rangka program penyelamatan warisan budaya, usaha pemerintah dan peranserta masyarakat untuk menghimpun benda-benda budaya yang mulai menjadi langka dan mendirikan museum-museum sebagai suka tempat berlindungnya, patut didukung dengan usaha-usaha lainnya yang secara akademis dan kultural administratif dapat dipertanggungjawabkan.

Tetapi usaha “penyelamatan” saja, sekalipun didukung oleh kegiatan preservasi dan konservasi dalam rangka pelestariannya, tentu saja bukan merupakan usaha yang tuntas.

Usaha preservasi benda budaya perlu dikaitkan dengan usaha-usaha yang manfaatnya lebih luas, yang dinikmati oleh masyarakat. Usaha mengumumkan

hasil studi mengenai benda budaya berupa publikasi memang sangat bermanfaat, tetapi terbatas pada publik pembaca. Sehubungan dengan hal inilah, maka perlu diketengahkan, bahwa dokumentasi dan informasi mengenai benda budaya, jangan hanya terbatas pada usaha dan kegiatan yang konvensional. Sebagai contoh misalnya, dalam makalah-makalah mengenai dokumentasi di museum yang telah diajukan dalam The 1973 All India Museums Conference di Mysore (Agrawal, 1974), para peserta ternyata menggunakan pengertian dokumentasi yang konvensional, sedangkan kegunaannya antara lain adalah untuk mensukseskan usaha pemberian informasi melalui kegiatan pameran di museum.

Demikian pula halnya dengan keterangan yang diberikan oleh Keneth Hudson, penulis buku yang berjudul *Museums for the 1980's. A Survey of World Trends*, di dalamnya dinyatakan:

Documentation. There is no essential difference between documentation and cataloguing. Both are concerned with accumulating, selecting and recording the information which exists about each item in a museum collection. The distinction, where it exists, is one of scope and detail. A catalogue entry consists of a summary of what is known and observable about an object, together with the circumstance of its acquisition and its history since it entered the museum. The documentation relating to the object would contain the catalogue entry, but might also include what could be described as context material—articles, notes and pictures about typology, materials, sale prices and so on, which would set the particular item in its place among comparable and related material. (Hudson, 1977:187).

Dari uraian tersebut ternyata katalogisasi berbeda dengan dokumentasi. Di dalam praktek, kegiatan katalogisasi dan dokumentasi konvensional berjalan simultan. Terutama katalogus subyek (subject catalogue) yang senantiasa harus memuat bahan informasi yang up to date, maka setiap tambahan bahan informasi dicatat pula dalam kartu katalogus. Setiap kurator museum praktis harus mengandalkan pada katalogus subyek yang up to date, sekiranya ia juga beritikad untuk setiap saat mengumumkan hasil penemuan atau hasil kajiannya mengenai benda budaya yang memang patut diinformasikan atau dikomunikasikan kepada masyarakat, baik secara tertulis melalui media cetak, maupun melalui pameran sebagai media komunikasi visual.

Yang jelas, pekerjaan katalogisasi baru dilakukan di museum setelah benda budaya itu resmi menjadi koleksi museum. Jadi, disamping inventaris benda koleksi terdapat juga katalogus koleksi. Lain halnya dengan kegiatan dokumentasi, merupakan kegiatan yang sudah dimulai sejak di lapangan sebelum benda budaya itu masuk museum sebagai benda koleksi. Kegiatan dokumentasi juga tidak perlu dikaitkan dengan kegiatan pengumpulan benda budaya untuk dijadikan benda koleksi museum. Kegiatan dokumentasi benda budaya adalah kegiatan perekaman semua bahan dan data informasi mengenai benda budaya.

Dalam kegiatan dokumentasi benda budaya, terdapat dua jenis kegiatan:

- (a) pengumpulan dan perekaman setiap bahan dan data informasi mengenai bendanya an sich, artinya membuat diskripsi mengenai segala aspek mengenai benda itu, dari mana asalnya, dari bahan apa dibuatnya, proses pembuatannya, detail bentuk, ukuran, berat, ragam hias, simbolik - bila ada - serta untuk apa guna dan manfaat benda itu dalam konteks latar belakang sosial budayanya;
- (b) perekaman secara audio-visual mengenai pelbagai aspek yang berkaitan dengan benda budaya, yang menggunakan peralatan elektronik dan optik (fotografi, slide, rekaman suara, rekaman film atau video), disebut juga dokumentasi visual.

Di National Museum of Ethnology, Osaka, Jepang, benda-benda budaya disajikan secara bertahap. Tahap pertama menurut tatanan geografis dan tahap selanjutnya menurut tatanan klasifikatoris atau tematis. Di bagian Asia Tenggara misalnya, dikelompokkan peralatan pertanian, peralatan angkutan dan lain sebagainya. Di sini hampir tidak dijumpai suatu tata penyajian yang evokatif, yang menyajikan suatu perangkat benda budaya dalam konteks dan latar belakang suasana masyarakat penopang kebudayaannya. Tata penyajian evokatif - yang memberikan suasana romantis - menempatkan benda-benda budaya yang dipamerkan sebagai mata rantai sebuah ceritera, cuplikan dari kehidupan yang faktual. Tetapi di museum tersebut, informasi mengenai manfaat dan latar belakang budaya daripada benda-benda koleksi yang dipamerkan itu bisa didapatkan di bagian lain, yakni di bagian pertunjukan film video. Suatu bagian di museum tersebut disediakan secara khusus bagi pengunjung museum untuk menonton pelbagai film video atas permintaan. Di tempat ini ada sebuah lorong panjang yang dibagi menjadi kotak-kotak

ruangan tempat duduk untuk empat atau enam orang. Kelompok ini dapat minta film apa saja sesuai dengan judul yang tercantum dalam katalogus film video. Ini berarti, bahwa para antropolog atau etnograf Jepang yang bekerja di museum tersebut, selain melakukan penelitian lapangan yang menghasilkan tulisan-tulisan etnografi, juga menyempatkan diri untuk melakukan kegiatan yang disebut etnosinematografi. Etnosinematografi itu sendiri sebenarnya sudah termasuk dalam perangkat antropologi visual, suatu spesialisasi antropologi yang prinsip-prinsipnya antara lain dapat dibaca dalam buku berjudul *Principles of Visual Anthropology* (Hockings, ed., 1975). Dengan munculnya antropologi visual dengan metode etnosinematografi, maka seperti yang diungkapkan oleh Margareth Mead (Hockings, ed., 1975:5), para etnolog, yang sebelumnya hanya menggunakan kata-kata sebagai media dokumentasi dan perekaman, kini dengan memahirkan diri dalam hal menggunakan peralatan film, akan dapat menghimpun dan merekam informasi secara visual, dan hasil rekamannya itu dapat dijadikan obyek studi analisis lebih lanjut.

Kajian benda budaya, selain dapat dilakukan berdasarkan tujuan kajian terhadapnya *an sich*, juga dapat bermanfaat bagi para antropolog pengelola koleksi museum. Namun, karena tuntutan masyarakat dewasa ini lebih banyak memerlukan informasi budaya - dalam rangka kegiatan etnokomunikasi - maka metode-metode presentasi benda budaya di museum menghendaki peningkatan pelbagai metode dan teknik dokumentasi mengenai benda budaya, tidak saja mengenai benda budaya *an sich*, tetapi secara kontekstual.

Kaitan antara makalah ini dengan kegiatan Seminar Kebudayaan Melayu ini ialah, bahwa penulis ingin membawa peserta kepada perangkat masalah yang dihadapi kalangan permuseuman, yaitu masalah pengumpulan benda budaya bukan saja yang berupa *archaeologica* dan *historica* tetapi juga benda-benda budaya *ethnographica*. Sebab, secara kuantitatif, kasanah budaya Melayu tidak mungkin bertanding dengan kasanah kebudayaan Jawa, Bali dan Madura misalnya. Kalau diamati, akan terlihat jelas bahwa kuantitas koleksi *ethnographica* budaya Melayu di Museum Sumatera Utara misalnya, tidak sebanding dengan *ethnographica* budaya Batak. Di samping itu, karakteristik kebudayaan Melayu yang bersifat kebudayaan air dan kebudayaan laut, belum sempat ditangani secara lebih sempurna. Ini merupakan tantangan bagi usaha dokumentasi dan kajian yang lebih luas mengenai karakteristik kebudayaan Melayu ini. Dari kenyataan yang ada, para petugas yang menangani proyek museum belum dapat menyebut jumlah yang pasti dari koleksi benda budaya yang telah terhimpun. Karena itu, perlu dipertanyakan informasi apa nantinya

yang akan disampaikan lewat media visual berupa pameran mengenai kebudayaan Melayu di Museum Riau. Jadi, di bidang pengumpulan dan dokumentasi mengenai kebudayaan fisik diperlukan suatu studi pendahuluan mengenai kuantitas dan karakteristik kebudayaan fisik Melayu, terutama yang menjadi ungkapan-ungkapan kebudayaan air dan kebudayaan lautnya.

Dengan kasanah budaya berupa ungkapan-ungkapan seni pertunjukan dan seni sastra (pantun dalam ungkapan-ungkapan ritual, seremonial dan hiburan), akan lebih tepat, jika kegiatan dokumentasinya menggunakan metode dokumentasi audio-visual. Memang tidak dapat diingkari, bahwa ungkapan seni tenun tradisional, seperti kain songket dan kain prada melimpah ruah di Riau ini, namun informasi visual melalui presentasi yang aktif dirasakan lebih tepat bila didukung dengan metode informasi yang bersifat visual. Pelbagai ungkapan ragam hias serta simboliknya dalam lingkungan budaya Melayu juga belum tuntas dikaji, dan usaha dokumentasi untuk memperoleh bahan dan data informasi tentang hal ini mungkin belum terlambat, bila masih tersedia nara sumber yang dapat menyampaikannya.

Bidang studi mengenai benda budaya dalam lingkungan kebudayaan Melayu, merupakan bidang garapan yang penuh tantangan, dan pelbagai jenis dokumentasi tentang benda budaya, seperti yang telah disampaikan di atas tersebut akan mendapat perhatian dan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penyusunan rencana kegiatan dokumentasi dan kajian di masa yang akan datang.

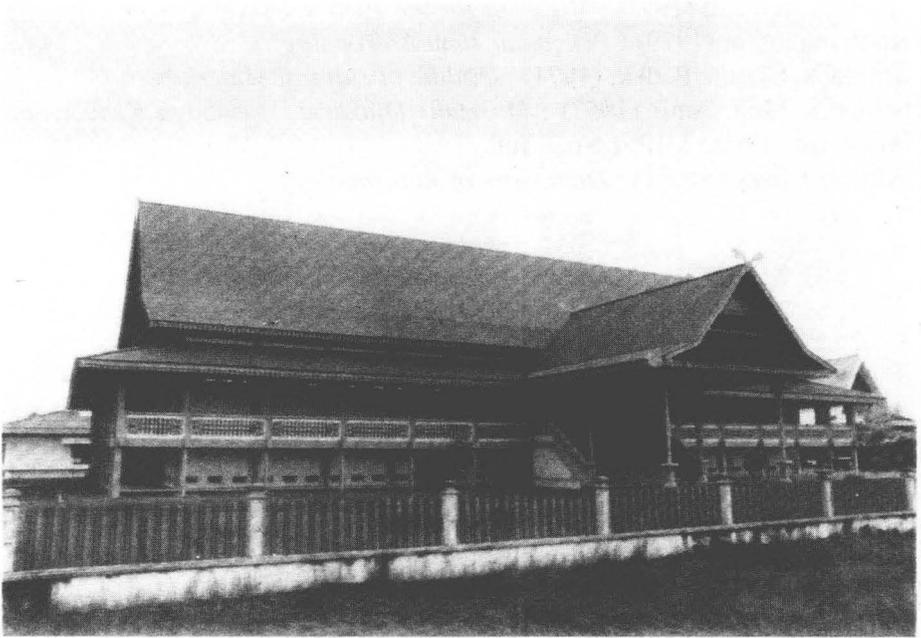
(Makalah pada Seminar Kebudayaan Melayu, Tanjung Pinang, 16 s.d. 21 Juli 1985).

#### Bahan Kepustakaan

Agrawal, O.P., ed (1974) : *Documentation in Museums*. Proceeding of The 1973 All India Museums Conference held at Mysore September 19-23.

Bosch, F.D.K. (1953) : *De Ontwikkeling van het Museumwezen in Nederlandsch-Indie*. Djawa, Jg.15, pp 209-221.

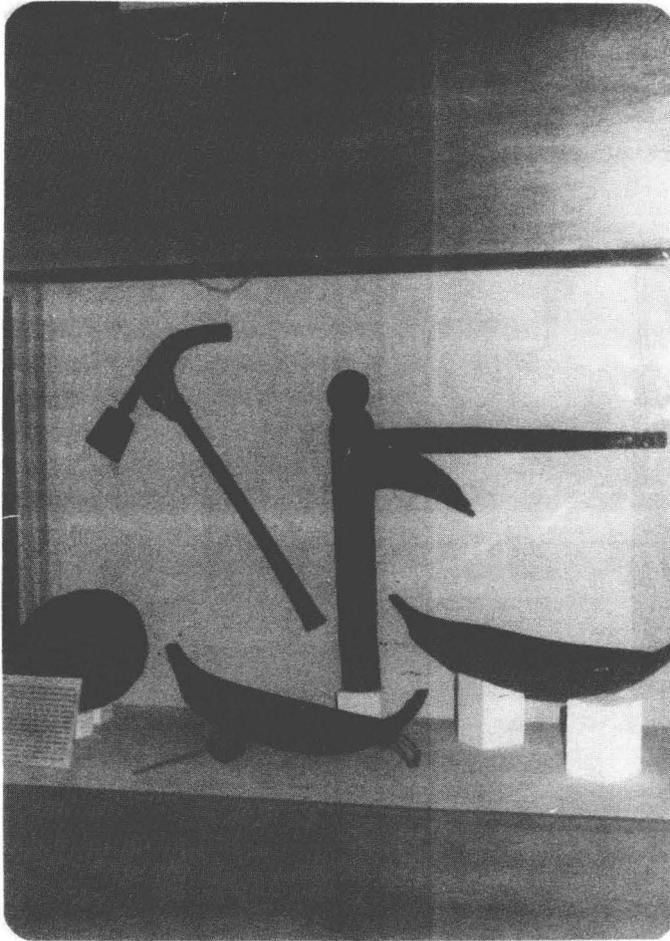
Herskovits, Melville J. (1949) : *Man and his Works*.  
Hockings, Paul, ed. (1975) : *Principles of Visual Anthropology*.  
Hudson, Kenneth (1977) : *Museums for the 1980's. Survey of World Trends*.  
Kontjaraningrat (1979) : *Pengantar Ilmu Antropologi*.  
Murdock, George P. dkk. (1971) : *Outline of cultural Materials*.  
Sutaarga, Moh. Amir (1957) : *Museum Djakarta. Lembaga Kebudayaan Indonesia*. Berita MIPI I No.3, Juli.  
Winick, Charles (1961) : *Dictionary of Anthropology*.



Museum Negeri Propinsi Riau, diharapkan dapat menjadi tempat untuk menyampaikan informasi tentang kebudayaan Melayu melalui media visual berupa pameran.



Kegiatan dokumentasi benda budaya adalah kegiatan perekamam semua bahan dan data informasi mengenai benda budaya.



Benda-benda budaya yang sudah menjadi koleksi museum, disajikan secara visual dalam suatu tata pameran tetap. Informasi tentang koleksi tersebut disajikan melalui label.

## MUSEUM SEBAGAI ALAT KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA

Pada tanggal 14 Juni 1974, The International Council of Museums (ICOM), dalam Eleventh General Assembly-nya, telah mengambil suatu keputusan yang sangat penting; keputusan untuk merubah definisi museum, yang kemudian dicantumkan dalam Statutes of ICOM, dan yang masih berlaku sampai saat ini, serta berbunyi sebagai berikut:

“A Museum is a non profit making, permanent institution in the service of society and of its development, and open to the public, which acquires, conserves, communicates, and exhibits, for purposes of study, education and enjoyment, material evidence of man and environment.” (Sutaarga 1983:18-19).

Apabila kita membandingkannya dengan definisi museum yang telah dikemukakan oleh Douglas Allan (1967:13) yang bertahan dari tahun 1960 sampai tahun 1967, yang berbunyi:

“A museum in its simplest form consists of a building to house collections of objects for inspection, study and enjoyment.”

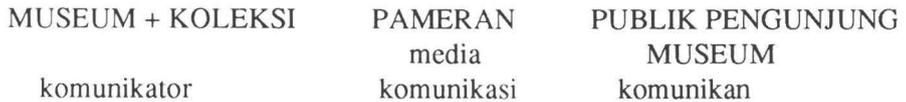
dan jika kita membandingkannya pula dengan definisi museum menurut Statutes of ICOM sebelum 1974, yang berbunyi:

“Any permanent establishment set up for the purpose of preserving, studying, enchanging by various means and, in particular, of exhibiting to the public for its delectation and instruction ..... artistic, historical, scientific and technological collections” (Pierre Schommer 1967:28).

maka sesuatu yang akan kita ketengahkan sebagai fokus uraian ini, yaitu kata “communicates”, yang baru muncul dalam definisi museum tahun 1974 itu tadi. Kata “communicates” sebelumnya tidak terpakai sama sekali.

Dari definisi museum tahun 1974 itu dapat dicuplik sebagian dari kalimatnya, antara lain, sehingga berbunyi: “A museum is ..... etc, which .... etc, communicates, and exhibits, for purposes of study, education and enjoyment, material evidence of man and environment.” Ada tiga aspek yang perlu diperhatikan dari kalimat cuplikan tersebut, yakni: (1) museumnya itu sendiri dan material evidence of man and environment sebagai wadah dan isi

yang dapat dianggap sebagai komunikator; (2) communicates and exhibits, yang dapat dianggap sebagai perlunya berkomunikasi, dan (3) for purposes of study and enjoyment daripada publik pengunjung museum, yang dapat dianggap sebagai komunikannya. Dengan demikian maka dapat dilukiskan sebagaimana bagan di bawah ini:



Tentu saja museum dengan koleksinya adalah barang mati, sekalipun misalnya museum itu berupa kebun binatang atau aquarium yang mempunyai koleksi dengan sebutan *living specimens* atau koleksi hidup, sebab, museum itu memang hanya merupakan alat komunikasi. Siapa sesungguhnya yang bertindak sebagai komunikator?

Sekarang kita beralih untuk menjelaskan kata-kata material evidence of man and environment. Di atas telah dinyatakan sebagai koleksi museum. Memang, yang dikumpulkan, yang dirawat dan diawetkan, yang dijadikan obyek kegiatan dan riset dan yang kemudian dikomunikasikan, ialah koleksi museum, yang diungkapkan dengan kata-kata bersayap: material evidence of man and environment, bukti material tentang kehadiran manusia dan lingkungan. Di satu pihak kita berhadapan dengan bukti material, dan di lain pihak kita berhadapan dengan man and environment. Dua kata ini mengandung makna yang luas yakni manusia sebagai makhluk biologis, sebagai bagian dari lingkungan hidup, bagian dari fauna, penghuni bumi, yang kemudian melalui pembuktian-pembuktian sejarah perkembangannya, manusia berinteraksi dengan lingkungannya, dan dengan akalnyanya telah mengubah bagian-bagian dari lingkungan hidupnya menjadi kebudayaan, dalam arti kebudayaan material. Hanya manusialah yang merupakan satu-satunya makhluk biologis yang dapat membuat pelbagai benda dengan bahan-bahan dari alam, dari lingkungan hidupnya.

Istilah teknis yang dipergunakan oleh kalangan ahli museologi bagi koleksi museum adalah: (a) *natural materials* untuk segala benda yang masih murni, yang masih merupakan bagian dari alam lingkungan hidup, seperti meteorit yang dikumpulkan oleh museum sains atau oleh museum geologi, atau koleksi botanica dan zoologica, yang disimpan di museum ilmu hayat;

(b) *cultural materials* atau benda-benda budaya, seperti archaeologica, historica, ethnographica, numismatica, heraldica, pokoknya segala macam benda buatan manusia, yang kadang-kadang disebut juga tangible cultural properties, kekayaan budaya yang dapat dipegang dan dipandang, untuk membedakannya dari istilah *tangible cultural properties*, atau kebudayaan dalam artian yang abstrak, yang sering diungkapkan dalam definisi tentang kebudayaan sebagai suatu sistem nilai, sistem gagasan, sistem ungkapan hidup, yang diajarkan dari generasi ke generasi berikutnya. 1)

Tetapi, interaksi manusia dengan alam lingkungan itu bukan saja telah menghasilkan benda-benda budaya, melainkan keseluruhan hasil karya karena akal dan budi manusia, yaitu berupa segala cabang seni dan ilmu, tetapi juga segala alam benda merupakan sarana yang tak terpisahkan dari aspek-aspek kebudayaan yang bersifat abstrak, misalnya aspek supranatural. Aspek supranatural, baik yang terungkap dalam sistem magi, sistem mistik, maupun dalam sistem religi, praktis menggunakan sarana berupa benda budaya. Dalam sistem magi di zaman nirleka, manusia prehistori melukiskan gambar-gambar ujung panah di bagian yang mematikan pada tubuh binatang buruannya, yakni pada lukisan guwa di Maros, Sulawesi Selatan (Van Hoekeren, 1949).

Demikianlah jadinya, bahwa museum dan koleksi merupakan suatu kesatuan yang harus manunggal. Museum (dalam arti kata staf museum) mengkomunikasikan benda-benda budaya dengan publik pengunjung museum. Dan soal ini bukanlah soal yang mudah. Memang museum berkomunikasi dengan cara menggunakan pameran. Jadi benda-benda budaya itu dipamerkan kepada umum untuk dapat berkomunikasi. Bagaimana mungkin benda-benda dapat berkomunikasi? Sebab benda tak dapat berbicara dengan bahasa manusia. Maka benda-benda budaya koleksi museum yang dipamerkan itu diberi label atau kartu penjelasan. Apabila benda itu merupakan sebuah lukisan yang bergaya naturalistis mudah saja pengunjung yang cukup cerdas menangkap makna yang diungkapkan oleh lukisan tersebut. Tetapi, kalau benda itu dalam suatu lemari pameran, sekalipun sudah diberi kartu penjelasan, merupakan benda yang asing, belum tentu dapat berkomunikasi

---

1) Istilah *cultural property* digunakan oleh *Convention on the means of prohibiting and preventing the illicit export, import and ownership of cultural property*, Unesco, 1970 (Hudson, 1977:25).

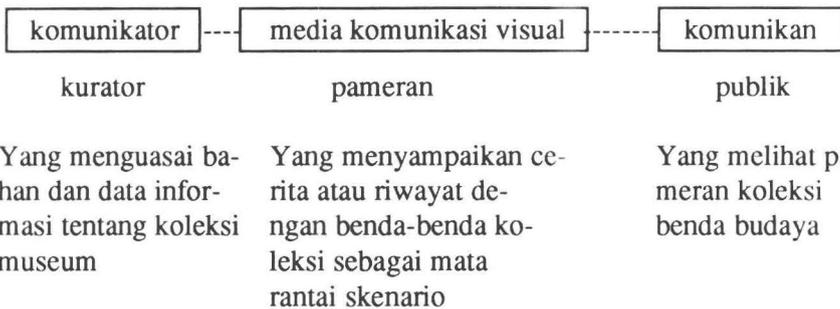
dengan orang awam. Patut diketahui, bahwa museum itu terbuka untuk umum, untuk keperluan studi dan rekreasi. Dan pengunjung museum dapat terdiri dari perorangan atau kelompok orang-orang, dapat terdiri dari orang awam, orang cendekiawan, dapat pula terdiri dari dewasa atau orang remaja. Juga penderita cacat dapat dilayani, jika kita sudah mempunyai itikad bahwa museum itu harus melayani masyarakat dengan seadil-adilnya.

Komunikasi dalam artinya yang abstrak tidak ada gunanya dalam konteks museologis, demikian pembukaan Kenneth Hudson dalam uraiannya mengenai museum dan pengunjungnya (Hudson, 1977: 77). Apabila seorang kurator berhadapan dengan koleksi asuhannya, seakan-akan sang kurator itu berkomunikasi secara akrab sekali dengan benda-benda koleksi yang ditimang-timangnya. Seorang kurator koleksi prehistori akan manggut-manggut penuh pengertian ketika ia sedang mendiskripsi sebuah kapak genggam paleolitik. Seorang kurator pun akan menarik muka yang kesal dan geram jika ia sedang mendiskripsi sebuah gelang batu yang cacat, tidak jadi, sebab ia bayangkan dalam benaknya, si pembuat gelang batu itu, yang dengan jengkel membantingkan atau membuang gelang batu yang tak mungkin dapat diselesaikan pembuatannya secara utuh, seperti yang ia inginkan. Tetapi, sebuah kapak genggam, sekalipun sudah diberi kartu penjelasan belum tentu dapat berkomunikasi dengan seorang pensiunan pegawai Jawatan Kereta Api, yang setelah mengambil uang pensiunnya mampir ke Museum Nasional, misalnya. Bapak ini dapat saja manggut-manggut, tetapi belum tentu setuju atau menunjukkan sikap penuh pengertian yang sebenarnya. Lain halnya, bila di samping kapak genggam yang dipamerkan itu dipajang pula sebuah gambar sketsa tentang bagaimana manusia purba mengubah gumpalan batu dengan cara memukul-mukul batu itu dengan batu lainnya sehingga menjadi sebuah kapak genggam. Kemudian ada lagi gambar sketsa yang meluksikan bagaimana manusia menggenggam kapak batu hasil buatannya dalam sikap cara memakainya. Maka jika bapak pensiunan tadi manggut-manggut di depan lemari pajang itu tadi yang memperagakan kapak genggam yang dilengkapi dengan gambargambar sketsa, maka manggut-manggutnya menandakan sikap pengertian yang meyakinkan. Maka telah terjadi suatu komunikasi antarbudaya, yakni antara manusia pemangku kebudayaan masa kini dengan manusia pemangku budaya zaman batu.

Atau kita dapat membandingkan dengan ilmu bahasa. Tiap benda mempunyai nama berupa satu perkataan. Dalam ilmu bahasa, bahasa itu merupakan sistem perlambang. Setiap kata melambangkan benda, gejala atau hal tertentu.

Tapi kata itu belum tentu mengandung pengertian yang sempurna, jika kata itu belum melakukan fungsi tertentu dalam satu kalimat yang sempurna. Apalagi bila kata itu memainkan peranan penting, maka semua kalimat dalam suatu uraian yang panjang lebar akan memberikan penjelasan yang dapat dipahami oleh pembuat atau oleh pendengarnya. Jelasnya, suatu informasi baru jelas jika dinyatakan oleh suatu kalimat. Demikian pula halnya dengan benda yang dipamerkan. Benda-benda koleksi arkeologi, sejarah dan etnografi, baru dapat berkomunikasi, jika dipamerkan secara kontekstual. Benda koleksi disajikan melalui teknik presentasi dan tata pameran masa kini berperan sebagai kunci atau mata rantai sebuah cerita atau suatu riwayat. Jadi, pengunjung baru dapat berkomunikasi dengan benda budaya, apabila teknik pameran dilakukan atas dasar suatu konsepsi atau skenario.

Dengan suatu bagan dapat dijelaskan sebagai berikut:



Jadi, kalau kita menghendaki bahwa setiap museum dapat berperan sebagai alat komunikasi antar budaya, atau antar pemangku kebudayaan, maka metode teknik presentasi museum-museum yang ada harus disesuaikan dan mengawali renovasi tata penyajian. Lebih-lebih bagi orang asing, bagi para pemangku kebudayaan lain yang ingin berkomunikasi dengan kebudayaan bangsa Indonesia, maka museum dapat memainkan peranan penting, karena ia mempunyai media komunikasi visual (pameran), yang dapat dinikmati oleh para cendekiawan, orang awam, bangsa sendiri atau bangsa asing. Untuk mendukung kejelasan cerita atau riwayat, tata penyajian koleksi dapat berupa diorama, dapat juga dilaksanakan dengan metode evokatif, artinya dengan menempatkan satu perangkat benda-benda koleksi dengan latar belakang atau suasana yang relevan dengan latar belakang budaya atau konteks cerita sejarah benda budaya yang bersangkutan. Minimal, perangkat

benda-benda koleksi yang dipamerkan itu, didukung dengan sajian foto atau foto-foto dokumentasi dan grafik, yang turut memberikan penjelasan tentang “cerita” atau “riwayat” yang melibatkan benda-benda koleksi tersebut.

Museum dengan tata penyajian seperti yang diuraikan tersebut di atas akan bermanfaat bagi komunikasi antar bangsa atau antar budaya, yang sekarang sedang menonjol dengan istilah *cultural tourism* atau wisata budaya. Tetapi, seorang kurator koleksi baru dapat menyusun konsepsi tata penyajiannya, jika ia memiliki bahan dokumentasi yang lengkap mengenai benda-benda koleksinya. Dan tentang ini tentu diperlukan suatu cerita tersendiri, karena kegiatan dokumentasi bagi seorang kurator museum adalah suatu kegiatan yang cukup kompleks dan memerlukan penguasaan beberapa macam keahlian dan keterampilan yang khusus lainnya.

Di atas telah ditunjukkan, bahwa dalam hal memandang museum sebagai alat komunikasi antar budaya, maka yang menjadi komunikan dari setiap kurator pengelola koleksi ialah publik pengunjung museum, dan pameran merupakan media komunikasi visual. Bagi museologi, masalah publik pengunjung museum ini, baru pada akhir-akhir ini menjadi pusat perhatian kajiannya. Hati nurani para pengelola museum atau para pengambil keputusan kebijaksanaan museum hampir serentak mengambil sikap berdasarkan orientasi kepada kepentingan publik museum. Artinya para ahli museologi mulai melontarkan kritik kepada para kurator koleksi yang karena materi pengetahuannya tentang koleksinya begitu luas dan mendalam, sehingga sering bersikap berat sebelah pada saat menentukan pilihan untuk pengadaan koleksi museum. Padahal mereka itu bekerja di museum, mengelola dan mengkaji koleksi museum yang kemudian menjadi obyek hobibnya, dengan menggunakan “public funds”, menggunakan uang negara atau dana yayasan, uang yang berasal dari masyarakat pembayar pajak atau masyarakat pemberi sumbangan.

Museum menyelenggarakan kegiatan presentasi koleksi yang disajikan kepada publik itu seakan-akan melakukan komunikasi satu arah, seperti halnya kita membaca surat kabar, mendengarkan radio atau menonton TV. Dan sekarang, untuk menjamin adanya komunikasi dua arah, maka surat-surat kabar pun sudah membuka “rubrik pembaca” dan radio pun ada yang menyelenggarakan siaran “suara pendengar”. Tentu saja komunikasi satu arah biasanya dapat dianggap kurang sehat, kurang mencerminkan sikap demokratis.

Dari sejarah perkembangan museum kita dapat menelusuri pelbagai asal mulajadinya museum. 2) Di antaranya banyak museum yang didirikan sebagai institutional museum, sebagai museum yang diselenggarakan oleh dan untuk kepentingan lembaga atau perkumpulan ilmiah di zaman “enlightment” di akhir abad ke-18 atau permulaan abad ke-19. Di Indonesia, Museum Nasional dan Perpustakaan Nasional, berasal dari museum dan perpustakaan Bataviaasch Genootschsp van Kunsten en Wetenschappen, didirikan tanggal 24 April 1778 (Sutaarga, 1957) dan berakhir statusnya sebagai badan swasta setelah diserahkan kepada Pemerintah Indonesia pada tahun 1962. Dan banyak pula museum yang asalnya dari bekas peninggalan penyelenggaraan pameran-pameran yang bercorak internasional. Para pendirinya berpandangan, bahwa daripada benda-benda yang pernah dipamerkan itu tak tentu nasibnya, maka benda-benda itu dijadikan inisi koleksi museum yang kemudian tumbuh menjadi museum ilmiah yang besar. The American Museum of Natural History di New York City, The Metropolitan Museum of Fine Art, New York, The National Museum (Smithsonian Institution) di Washington D.C., adalah contoh-contohnya (Burcaw, 1979: 20-21). Yang menarik dalam kaitan dengan hal tersebut adalah munculnya museum-museum ilmu bangsa-bangsa di Eropa. (Wittlin, 1949 dan Frase, 1960). Yang ingin disinggung sehubungan dengan asal mula jadinya museum-museum ilmiah itu ialah adanya pola sikap dan kecenderungan sikap para kurator yang tekun sekali menggarap pengelolaan dan kajian tentang benda-benda koleksinya, sehingga mereka seakan-akan hanya bekerja bagi kepentingan lingkungan ilmu semata-mata, dan benda-benda koleksinya dipamerkan hanya berdasarkan sistem dan klasifikasi ilmu yang berkaitan dengan koleksinya saja. Tak pernah muncul perhatian dan persoalan mengenai bagaimana mengkomunikasikan koleksi dengan publik pengunjungnya. Jadi pada saat itu, walaupun kita misalnya sudah boleh mengatakan museum sebagai alat komunikasi antar-budaya. maka hal itu masih terbatas pada komunikasi antar ahli dan antar sarjana ilmu budaya saja.

Sebuah studi tentang hubungan antropologi dengan publik serta peranan museum di dalamnya telah diumumkan oleh H.H. Frase (1960). Tetapi uraiannya terbatas pada museum-museum antropologi di Eropa, dan peranan museum antropologi di Eropa tentunya memberikan informasi tentang kebudayaan bangsa-bangsa non-Eropa kepada publik Eropa.

---

2) Periksa a.l. Wittlin (1949) dan Burcaw (1979)

Bagi kita di Indonesia, publik museum yang kita anggap sebagai komunikan utama ialah bangsa kita sendiri. Bangsa kita sendiri sifatnya majemuk dan museum di Indonesia berperanan sebagai alat komunikasi antar budaya suku bangsa.

Di samping itu para wisatawan asing pun menjadi komunikan museum-museum di Indonesia, dan dalam hal ini tentunya ada perasaan antara tugas museum antropologi di Eropa dengan museum antropologi di Indonesia. Dengan dilaksanakannya kebijaksanaan Pemerintah, bahwa di setiap propinsi ada museum dengan pilihan pendirian jenis museum umum dengan inti koleksi benda budaya sukubangsa-sukubangsa penghuni wilayah propinsi masing-masing, maka terdapat peluang untuk menyelenggarakan pameran-pameran keliling bertemakan wawasan nusantara. Benda-benda koleksi yang menampilkan bentuk, fungsi, atau ragam hias yang mengandung nilai “bhineka tunggal ika” dipamerkan dalam rangka perkenalan antar budaya sukubangsa atau juga dapat kita sebut dalam rangka komunikasi antar budaya sukubangsa. Tetapi suatu studi khusus mengenai hasil kegiatan pameran itu serta dampak yang timbul karenanya di kalangan publik pengunjung belum lagi sempat dilakukan. Mudah-mudahan di kemudian hari kajian seperti itu dapat dilaksanakan.

Di kalangan ahli museologi dan para pengelola museum, dewasa ini terdapat slogan yang berbunyi: apabila publik tidak datang ke museum, maka museum harus datang ke publiknya.

Slogan ini telah menyebabkan timbulnya kegiatan-kegiatan “*museum-out-reach*”, yang bentuk dan lingkungannya bermacam-macam.

Dari model penyiapan dan pengiriman peti-kemasan yang sederhana yang dilengkapi dengan peragaan, foto, slide dan brosur-brosur penjelasan untuk kepentingan sekolah-sekolah terpencil, atau sekolah-sekolah yang memesannya, sampai pada kegiatan pameran keliling yang bercorak regional atau internasional. Dari pameran antar museum yang sifatnya antar daerah, sampai kepada yang sifatnya hubungan antar bangsa. Seorang kepala museum atau seorang kurator museum di saat ini diharapkan untuk berpikir kreatif, penuh gagasan.

Dengan pameran sebagai bentuk dan teknik komunikasi yang bersifat visual serta didukung pula oleh pelbagai media pendukung berupa penyajian slide and sound programmes, pertunjukan film 3), brosur dan katalog pameran, maka museum masa kini sudah memasuki era komunikasi dalam sistem dan jaringan penyebaran informasi antar-budaya dalam arti yang luas.

Unesco dan Icom (*International Council of Musums*) sangat mendorong usaha-usaha kerjasama antar museum melalui usaha-usaha pameran keliling. Indonesia pun pernah menyelenggarakan pameran keliling ke Amerika Serikat mengenai kesenian Indonesia klasik dalam rangka usaha pengumpulan dana bagi proyek pemugaran Candi Borobudur. Pameran sejenis pernah pula dikelilingkan ke pelbagai museum besar di beberapa kota di Eropa. Maka bukan saja diperlukan tenaga ahli yang trampil dalam hal bongkar-muat, pengepakan, dokumentasi, asuransi, pengamanan dan lain sebagainya. Apabila ada yang mengatakan, bahwa “dunia makin sempit”, itu bukan saja dapat berarti akibat ledakan penduduk, tetapi juga karena komunikasi antar bangsa dan antar budaya dengan segala bentuk dan teknik komunikasi yang semakin meningkat. Juga museum turut memainkan peranan dalam usaha komunikasi antar bangsa dan antar budaya seperti yang telah dijelaskan di atas.

(Dimuat dalam majalah KOMUNIKA, Tahun ke VI, Nomor 3, 1985 halaman 22-28. LIPI. Jakarta)

---

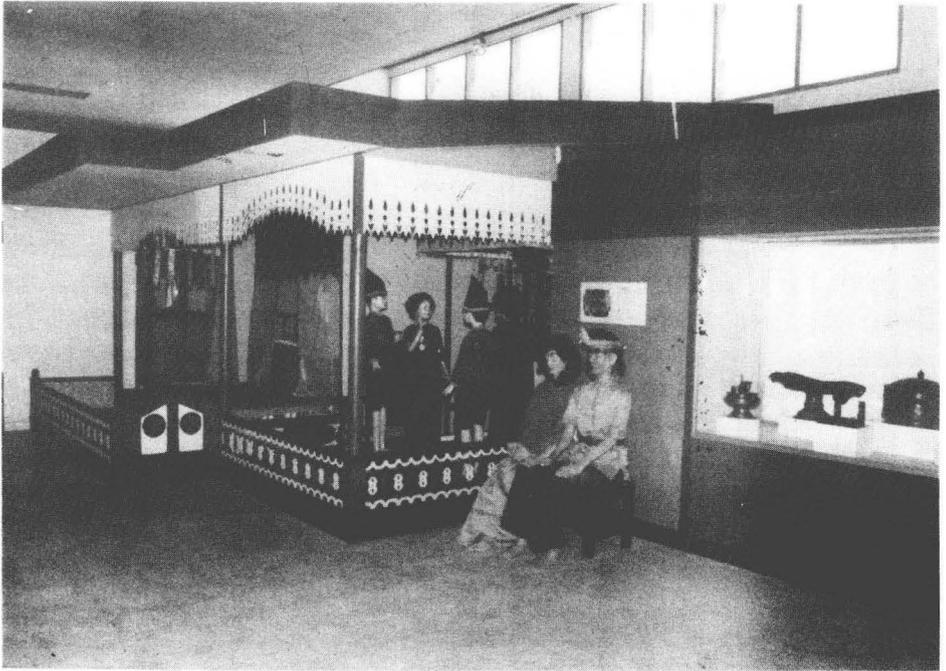
3) Peranan etnografi dan etnosinematografi dalam hal mendukung kegiatan presentasi koleksi museum antropologi tidak dapat diabaikan. Kaitannya erat dengan studi antropologi visual dan etnokomunikasi. Periksa a.l.Hockings (1975)

## DAFTAR PUSTAKA

- Allan, Douglas A. 1967 : *The Museum and its Functions*, dalam buku *The Organization of Museums, Practical Advice*. Unesco, 2nd impression.
- Burcaw, G. Ellis. 1979 : *Intruduction to Museum Work*. The American Association for State and Local History. Nashville. Fourth Printing.
- Frese, H.H. 1960 : *Anthropology and the Public. The Role of Museums*. Medelingen van het Rijkmuseum voor Vulkenkunde, Leiden. No.14.
- Heekeren, H.R. van. 1950 : *Rockpaintings and other Prehistoric Discoveries near Maros (S.W. Celebes)*. Laporan Tahunan Dinas Purbakala.
- Hockings, Paul. (Editor). 1975 : *Priciples of Visual Anthropology*. Mouton Publication. The Hague. Paris.
- Hudson. Keneth. 1979 : *Museums for the 1980's. A Survey of World Trends*. Unesco.
- Schomer, Piere. 1967 : "*Administration of Museums*". Dalam buku *The Organization of Museums. Practical Advice*. Unesco. 2nd impression.
- Sutaarga, Moh. Amir. 1957 : *Museum Djakarta. Lembaga Kebudayaan Indonesia*. Berita MIPI I No.3. Juli.-1983.
- Pedoman Penyelenggaraan dan Pengelolaan Museum*. Direktorat Per-museumman. Direktorat Jenderal Kebudayaan. Jakarta. Cet.ke-2.
- Wittlin, Alma S. 1949 : *The Museum. Its History and its Task in Education*. Routledge and Kegan Paul. London.



Benda-benda koleksi yang menampilkan bentuk, fungsi atau ragam hias yang mengandung nilai "Bhineka Tunggal Ika" di pameran dalam rangka pengenalan antar budaya suku bangsa atau juga dapat disebut dalam rangka komunikasi antar budaya suku bangsa.



Untuk mendukung kejelasan cerita atau riwayat, tata penyajian koleksi dapat berupa diorama, dapat juga dilaksanakan dengan metode evokatif, artinya dengan menempatkan satu perangkat . . . . .



..... benda-benda koleksi dengan latar belakang atau suasana yang relevan dengan latar belakang budaya atau konteks cerita sejarah benda budaya yang bersangkutan.

## **ARKEOLOGI MUSEUM: Suatu Perkenalan**

Karangan berikut ini tidak berpretensi sebagai suatu uraian akademik yang tuntas, melainkan hanya suatu uraian yang bertujuan memperkenalkan suatu bidang studi yang patut mendapat perhatian para mahasiswa arkeologi, baik yang sekedar menaruh minat kepada bidang studi museologi, atau yang memang mempunyai cita-cita untuk aktif bekerja di sebuah museum, setelah menyelesaikan studinya. Istilah arkeologi museum memang kurang biasa bagi telinga kita. Tetapi kalau diungkapkan dalam bahasa Inggris museum archaeology, akan tersirat suatu suasana penuh 'gengsi'. Persoalannya adalah, apakah arkeologi museum itu memang ada atau hanya sekedar mengada-ada. Uraian di bawah ini akan mencoba menjawabnya. Istilah arkeologi museum bukan hasil permainan lidah saja, tetapi memang suatu istilah yang menggambarkan suatu bidang studi 'baru'. Yang jelas, di masa sekarang ini, sudah menjadi kenyataan bahwa tidak ada suatu cabang ilmu yang dapat berdiri sendiri. Dengan kata lain, bahwa setiap ilmuwan di masa sekarang ini berhadapan dengan keperluan adanya kegiatan kajian yang bersifat interdisipliner.

Di lihat dari segi ini, maka ada dua bidang studi yang bergabung untuk bekerjasama, yakni (a) arkeologi dan (b) museologi.

Bagi para mahasiswa arkeologi tentu bukan hal yang baru untuk memaklumi sejarah perkembangan arkeologi, dan juga bukan hal yang baru bahwa sebagian dari obyek kajian yang mereka jumpai yang antara lain berupa benda-benda arkeologi, terdapat sebagai bagian dari koleksi museum.

Di Amerika Serikat, himpunan ahli arkeologi SOPA (Society of Professional Archaeologists) didirikan dalam tahun 1976 telah mengemukakan kualifikasi dan pembakuan bagi para ahli arkeologi, yang menetapkan kriteria bagi latihan dan pengalaman yang perlu dijalani, antara lain perlunya pengalaman bekerja di museum paling sedikit selama enam bulan. (Sharer dan Ashmore, 1980, 15-16). Tetapi bila seorang mahasiswa arkeologi melakukan studi praktikum di museum, itu tidak berarti mereka juga mendapat pengetahuan museologi, sebab pada umumnya para mahasiswa lebih sering dilibatkan dalam hal 'menggumuli' koleksi museum, sebagai obyek kajian mereka. Jadi lebih banyak kegiatan kuratorial yang mereka bantu, suatu pekerjaan 'di belakang layar', yang tidak ada sangkut pautnya dengan kegiatan 'di depan

layar', artinya pekerjaan yang tidak langsung berhubungan dengan masyarakat pengunjung museum. Lain halnya dengan para mahasiswa - misalnya - pada Department of Museum Studies Leicester University, UK, yang di samping mempelajari arkeologi sebagai studi utama, mengambil museologi sebagai studi pilihan, maka di samping benar-benar mereka diarahkan menjadi ahli arkeologi juga akan menjadi ahli museologi. Hal ini antara lain dapat dipelajari pada dokumen yang memuat daftar mata pelajaran dan rencana studinya.<sup>1)</sup>

Apabila perkembangan studi arkeologi di Indonesia telah menunjukkan kecenderungan untuk mengembangkan apa yang dapat disebut scientific archaeology, <sup>2)</sup> yang ruang lingkup kajian dan kegiatannya dapat dibaca pada buku *Fundamentals of Archaeology* karangan dua ahli tersebut di atas. Sedangkan yang disebut conservation archaeology, walaupun di dalam praktek telah dimulai secara simultan, namun di lingkungan kampus, belum dikembangkan secara mendasar. Di dalam prakteknya, arkeologi ditangani oleh dua instansi pemerintah, yang satu menangani scientific archaeology (Pusat Penelitian Arkeologi Nasional) dan yang lainnya menangani conservation archaeology (Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala). Yang satu membawahi beberapa unit pelaksana teknis di tingkat daerah (Balai Kajian Arkeologi) dan yang lainnya membawahi Kantor-kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala.

Baik pada Balai Kajian Arkeologi, maupun pada Kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala, ditambah dengan usaha pengembangan site museum, di samping telah lama pula adanya koleksi arkeologi pada beberapa museum umum tingkat propinsi, dikelola oleh Direktorat Permuseuman, terdapat sarana dan fasilitas bagi kegiatan arkeologi museum, tetapi belum digarap sebagaimana yang diharapkan.

Apa yang dimaksudkan dengan arkeologi tentunya bagi para mahasiswa arkeologi sudah jelas, tetapi apa yang disebut museum dan museologi, ada baiknya untuk dijelaskan lebih dulu. Kemudian akan dijelaskan lebih lanjut titik-titik singgung kedua disiplin tersebut yang menjadikan sub-disiplin arkeologi museum.

---

1) *Option for Archaeology Students*, Department of Museum Studies, University of Leicester. 1982

2) Periksa pula Thomas, 1979, 146-155 O&3

Sesungguhnya definisi tentang museum itu banyak (Burcaw, 1979: 9-13). Definisi yang secara internasional diakui, yang dirumuskan oleh ICOM (The International Council of Museums) juga telah mengalami perubahan. Definisi ICOM tentang museum seperti yang dapat dibaca dalam Statutes of ICOM, setelah sidang umumnya ke-11, Kopenhagen, 14 Juni 1974, memuat rumusan kegiatan museum, yang mencerminkan gagasan dan keinginan para ahli museologi dan para profesional di kalangan permuseuman, agar kegiatan museum juga meliputi kegiatan komunikasi dan salah satu tujuan penyelenggaraan museum ialah antara lain untuk kepentingan kemajuan masyarakat lingkungannya. Secara lengkap definisi tersebut dikutip dalam bahasa Inggris sebagai berikut:

“A museum is a non profit making, permanent institution in the service of society and of its development, and open to the public, which acquires, conserves, communicates, and exhibits, for purposes of study, education and enjoyment, material evidence of man and environment.

In addition to the museums designated as such, ICOM recognizes that the following comply with the above definition:

- (a) Conservation institutes and exhibition galleries permanently maintained by libraries and archive centres;
- (b) Natural, archaeological, and ethnographic monuments and sites and historical monuments and sites of a museum nature, for their acquisition, conservation and communication activities;
- (c) Institutions displaying live specimens, such as botanical and zoological gardens, aquaria, vivaria, etc.
- (d) Nature reserves;
- (e) Science centres and planetariums.”

Mengenai museologi, definisinya pun tidak sedikit. Di kalangan permuseuman terdapat dua pendapat; kelompok pertama belum dapat menerima museologi sebagai suatu ilmu yang mandiri, dan masih memandangnya sebagai “museum work” dan kelompok kedua berkeyakinan, bahwa museologi sudah menjadi-sekurangnya - sedang berkembang menuju ilmu yang mandiri. Tetapi, terlepas dari disput yang ada, ICOM, sejak sidang umumnya di Moskwa, tahun 1977, telah memutuskan untuk mensahkan berdirinya komite

internasional yang baru di samping komite-komite internasional lainnya, yakni International Committee of Museology, disingkat ICOFOM. Majalah

ICOFOM ialah MUWOP (Museological Working Papers) dan *Museological News*. MUWOP baru terbit dalam dua nomor, dan *Museological News* sudah terbit beberapa nomornya. 3)

ICOM sendiri sebelum terbentuknya ICOFOM, sudah merintis penyusunan naskah *Treatise on Museology*, tetapi hingga sekarang belum juga terbit. Namun pelbagai buah pikiran para ahli, yang antara lain dapat dibaca dalam kedua nomor MUWOP 4) dapat meyakinkan kita, bahwa museologi sedang tumbuh, dan dengan sadar sedang dikembangkan menjadi disiplin yang mandiri, dengan obyek, metode dan teori-teorinya. Di antara sekian karangan dalam MUWOP No.1 tahun 1980, karangan Prof. Soichiro Tsuruta dari Hosey University, adalah yang paling menarik, sekalipun mungkin dapat dianggap .lh8 terlampau berani dan menunjukkan sikap futuristik. Tsuruta menghubungkan perubahan definisi museologi menurut ICOM sebelum dan sesudah perubahan definisi museum. Maka ia mencoba menunjukkan konsistensi dan relevansinya antara museum dengan museologi sebagai obyek dan bidang studinya. Memang dalam tahun 1972, sebelum lahirnya ICOFOM, atas usaha komite internasional untuk latihan tenaga museum, definisi museologi dirumuskan sebagai berikut:

“Museology is museum science. It has to do with the study and background of museums, their role in society, specific system for research, conservation, education and organozation, relationship with the physical environment, and the classification of different kinds of museums”.

Setelah mengutip definisi museum versi ICOM tahun 1972 itu, maka Tsuruta membuatkan sebuah tabel yang mencantumkan pelbagai prosesnya, tingkat perkembangannya, features dan periode museologi menjadi lima proses pentahapan perkembangan.

---

3) Terdapat pula majalah *Museologi* lainnya yang diterbitkan oleh pelbagai himpunan museum tingkat nasional seperti misalnya:

*Zeitschrift fur Museumkunde* di Jerman yang sejak terbaginya Jerman menjadi dua, di RFJ menggunakan nama yang sama sedang- kan di RRJ ditambahdengan *Neue Museumkunde*.

4) No.I/1980 dengan tema “Museology - science or just practical work?” No.II/1981 dengan tema *Interdisciplinarity in Museology*. o,3

Processes	Stages	Features	Periods
I	Mouseion and museum stage	Only museums appeared and existed	Mouseion in Alexandria to Mediaval era
II	Museolore (Museo +lore)stage	Spread of information on museums	From Renaissance to Industrial Revolution
III	Museography and stage	Description of museums	19th century to early 20th developed
IV	Museology and museography stage	Start of scientific but qualitative research on museums	Present
V	Museum Sciences and Museum technologies stages on museums	Need for quantitative and systematic research	End of 20th century

Selanjutnya Tsuruta mengusulkan suatu sistem museologi, yakni suatu sistem yang terdiri dari komponen atau segmen sebagai berikut:

- (1) Auto-Museology (Individual Museology), yang dapat dibagi lagi menjadi:
  - (1.1) Museum Taxonomy;
  - (1.2) Morphological Museology;
  - (1.3) Functional Museology.
- (2) Specialized Museology, yang menurut Tsuruta dapat dipecah-pecah menjadi: Art Museology; History Museology; Science Museology, dan seterusnya.
- (3) Syn-Museology (Population Museology);
- (4) Socio-Museology;
- (5) Museum management.

Mengingat, bahwa karangan ini bukanlah untuk menjelaskan museol-

ogy, melainkan untuk memperkenalkan arkeologi-museum, maka perlu kembali kepada masalah titik-titik singgung arkeologi dengan museum dan museologi. Yang paling dekat ialah arkeologi menurut definisi, metode, teori dan tujuan-tujuannya, seperti yang dikemukakan oleh Sharer dan Ashmore (1980: 10-14).

Suatu aspek yang menjadi milik bersama antara arkeologi dan museum, yakni mengkaji dan mengumumkan hasil kajian mengenai “material evidence of man and environment” dari masa yang lampau. Tetapi bagi seorang kurator arkeologi di museum, caranya ia mengumumkan interpretasi arkeologis terhadap benda-benda pembuktian manusia, lingkungan dan hasil-karyamanusia dari zaman yang lampau itu, bukan dengan cara verbal saja, melainkan dengan cara visual, melalui kegiatan pameran. Dan hanya seorang kurator arkeologi yang telah menambah khasanah pengetahuan dan keterampilan di bidang museologi, antara lain mengenai bidang studi dan teknologi komunikasi benda-budaya, maka ia dapat membuat visualisasi diskripsi bentuk, analisis fungsi dan elusidasi proses obyek kajiannya, sehingga terciptalah suatu pameran yang memungkinkan manusia purba dengan hasil karya dan perilakunya berkomunikasi dengan manusia masa kini.

Maka seyogyanyalah bila ia dapat bekerjasama dengan ahli pameran, bagaimana menyusun desain pameran arkeologi dengan metode dan teknik penyajian yang evokatif, tanpa meninggalkan dasar-dasar dan sistem arkeologi. Sebab dengan memamerkan benda-benda dan fosil-fosil dari zaman purba, secara artistik menurut sistem yang ada, sekalipun ditambah dengan kartu-kartu penjelasan secukupnya, tanpa memperhatikan komunikasi yang sebagian besar orang awam, maka sulit untuk dikatakan bahwa komunikasi dapat berkomunikasi dengan zaman yang telah ratusan atau ribuan tahun kita lampau, apalagi menghayatinya.

(Artikel dimuat dalam Edisi Khusus ROMANTIKA ARKEOLOGIKA, KAMAFSUI, Oktober 1986, no.9 th VIII, pp 28-37: 38- )

**Daftar Pustaka** Burcaw, G. Elis. 1979 , *Intruduction to Museum Work*.  
Sharer, Robert J. & Wandy Ashmore. 1980 , *Fundamentals of Archaeology*.  
Thomas, David Hurst. 1979, *Archaeology*.  
*Museological Working Papers* No.I, Th. 1980, dan No.II, th. 1981.



Penyajian koleksi arkeologia berupa replika prasasti Ciaruteun di Museum Negeri Jawa Barat Bandung.

## PERKEMBANGAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PERMUSEUMAN

Pada peresmian Museum Sonobudoyo di Yogyakarta, tepatnya bulan Nopember lima puluh tahun yang lalu telah dibacakan dua pidato penting tentang museum. Pidato pertama dibawakan oleh Prof. Dr P.A. Hoesein Djajadiningrat yang ketika itu menjabat sebagai ketua Java Institut, dan pidato kedua disampaikan oleh Prof. Dr F.D.K. Bosch yang pada waktu itu menjabat sebagai Directeur van den Oudheid kundigde Dienst, merangkap Directeur van het Museum van het Kon.Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Pidato almarhum Prof. Hoesein berisikan dasar dan tujuan didirikan dan diselenggarakannya Museum Sana Budaya, yang selain menjadi sarana usaha pengkajian kebudayaan Jawa dan kebudayaan-kebudayaan etnik lainnya yang berhubungan erat dengan kebudayaan Jawa seperti Cirebon, Madura dan Bali, juga bertujuan untuk menjadikan Museum Sonobudoyo sebagai tempat pelestarian dan penyajian warisan budaya Jawa, yang antara lain dapat dimanfaatkan oleh generasi penerus untuk mengembangkan seni kerajinan dengan bersumberkan kepada contoh-contoh ungkapan puncak kesenian para leluhur mereka.

Pidato mendiang Prof. Bosch berjudul “*De Ontwikeling van het Museumwezen in Nederlandsch Indie*”. Pidato ini sangat penting bagi setiap pengamat, pengkaji dan pembina permuseuman, sebab hasil pengamatan, ujaran, analisis dan kesimpulan serta saran-saran yang dikemukakan dalam pidato tersebut sampai saat ini untuk sebagian besar masih mengandung arti yang relevan dengan situasi saat ini dan perlu untuk selalu direnungkan kembali. Pidato tersebut selengkapnya dapat dibaca dalam majalah Jawa terbitan tahun 1935 halaman 209-221. 1)

Selanjutnya akan ditelaah lebih jauh tentang istilah museumwezen. Istilah ini sangat sulit untuk diungkapkan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris pun tidak terdapat terjemahan yang tepat bagi istilah tersebut. Klaus Schreiner dalam bukunya yang berjudul *Fundamentals of Museology*, dengan sub judul *On the Theory and Methodology of Collecting, Preserving, Decoding and Utilizing Musealia*, 1985, menggunakan kata Inggris *Museum domain*. Mendiang Dr Grace Morley - dalam korespondensi dengan penulis menggunakan istilah *museum-movement*. Kata *museumwezen* dapat pula

diungkapkan dengan kata - misalnya - seluk beluk museum atau hal ihwal museum.

Sekarang, digunakan kata permuseuman. Walaupun berbunyi hibridis, namun terpaksa digunakan untuk seterusnya.

Secara tidak sadar, baik Bosch, Koperberg, John Irwin dan penulis sendiri, dalam hal memandang museumwezen atau permuseuman itu, sebagai suatu sistem. Hal ini ditegaskan pula oleh Dr Buchari Zainun dari Lembaga Administrasi Negara, ketika Direktorat Museum pada tahun 1976 menyelenggarakan Seminar Pengelolaan dan Pendayagunaan Museum. Uraian lebih jauh tentang hal ini dapat dibaca dalam laporan tentang seminar tersebut yang telah diterbitkan oleh Direktorat Museum.

Dr Buchari Zainun juga bertindak selaku wakil LAN pada Staf Menteri Penertiban dan Pendayagunaan Aparatur Negara pada waktu diadakan pembahasan restrukturisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nama Direktorat Museum diganti menjadi Direktorat Permuseuman dengan obyek pembinaan serta pengembangannya menjadi jelas, yakni sistem permuseuman. Dengan adanya perubahan itu maka sistem klasifikasi museum yang digunakan pun dipertegas yakni dengan adanya kelompok museum-museum dengan jenis museum umum dan museum khusus tingkat nasional, tingkat regional dan tingkat lokal.

Museum umum ialah museum yang koleksinya berkaitan dengan banyak cabang seni dan ilmu, sedangkan museum khusus ialah museum yang koleksinya secara khusus berkaitan dengan satu disiplin ilmu saja, misalnya museum ilmu hayat, museum sejarah, museum arkeologi dan sebagainya.

Setelah masa pembangunan memasuki Pelita II, maka ditetapkan suatu kebijaksanaan untuk memugar dan memperluas museum-museum daerah warisan zaman kolonial, diarahkan untuk menjadi jenis museum umum, dan bagi propinsi yang sama sekali belum memiliki museum, didirikan museum baru dengan jenis museum umum pula.

Gagasan pokok untuk mendirikan museum-museum umum di setiap ibukota propinsi, ialah agar dapat mencerminkan falsafah umum museum seperti yang tersirat dalam rumusan definisi museum menurut ICOM (*The International Council of Museums*) yang dapat dibaca dalam statutes of ICOM setelah sidang umumnya bulan Juni 1974. Dalam kenyataannya, apa yang disebut museum umum dalam artian general museum memiliki koleksi

bermacam ragam, tetapi belum tentu merupakan suatu integrated museum. Dan dalam kenyataannya jumlah museum khusus - di mana saja - jauh lebih banyak daripada jumlah museum yang berpretensi disebut museum umum.

Gagasan untuk memberikan corak museum umum bagi museum tingkat propinsi, yang dukungan dananya berasal dari program penyelamatan warisan budaya, melalui proyek-proyek rehabilitasi dan perluasan museum, kemudian melalui proyek-proyek pengembangan permuseuman, ialah karena hasil pengamatan ethnomuseologis menunjukkan akan dicapai atau diperkirakan akan tercapai manfaat yang lebih luas dan praktis, sebab modalnya ialah usaha mengamankan warisan budaya yang tangible, bukan semata-mata benda arkeologi dan sejarah, tetapi mengingat proses akulturasi - yang sudah disinyalir oleh mendiang Prof Bosch, tahun 1935 - berjalan lebih dahsyat, justru benda-benda etnografi yang mulai semakin langka. Dan siapa saja yang akan melukiskan ethnografi suatu kelompok etnik, mau tidak mau yang bersangkutan harus memilih metode pendekatan holistik. Maka diskripsi tentang lingkungan alam, evolusi fauna dan flora, dan ungkapan-ungkapan kebudayaan etnik, sebagai hasil interaksi antara manusia dan lingkungannya, akan lebih mudah dibuatnya. Hanya perlu disayangkan, para pemimpin proyek-proyek permuseuman belum memiliki pengetahuan ensiklopedik, kurang memahami dasar dan tujuan pendirian-pendirian museum umum tersebut. Padahal manfaat museum umum itu banyak. Ia akan dapat berperan sebagai suatu lembaga pendidikan non-formal untuk turut meningkatkan kecerdasan bangsa. Dan bila museum-museum umum itu dikelola baik, ia pun dapat berperan sebagai museum pembina bagi museum-museum khusus lokal di wilayah propionsinya masing-masing.

Museum Nasional di Jakarta dapat dipandang sebagai “*grandmother museum*”, museum umum tingkat propinsi sebagai “*mother museum*” dan museum-museum lokal sebagai “*grandchildren museum*”. Selama Pelita I, hanya ada dua lokasi proyek rehabilitasi dan perluasan museum, yakni di Jakarta untuk mendadani Museum Pusat, dan di Bali untuk memugar dan memperluas Museum Bali di Denpasar. Museum Bali yang dulu didirikan dan diselenggarakan oleh Bali Museum Vereniging, sejak tahun 1964 telah diserahkan kepada Pemerintah Pusat, cq Departemen PPK, dan dibina oleh Lembaga Museum-museum Nasional di Jakarta. Sedangkan Museum Jakarta Lama, di jalan Pintu Besar Utara Nomor 27 Jakarta Kota, yang dulu didirikan dan diselenggarakan oleh Stichting Oud Batavia, oleh Direktorat

Jenderal Kebudayaan diserahkan kepada Pemerintah DKI Jakarta, dan kini gedungnya ditempati oleh Museum Wayang, sedangkan Museum Jakarta Lama, koleksinya pindah ke gedungnya yang sekarang di Taman Fatahillah dengan nama Museum Sejarah Jakarta. Kemudian Pemerintah DKI Jakarta mendirikan Dinas Museum dan Sejarah, dan memugar gedung-gedung bersejarah yang kemudian diberi fungsi sebagai museum. Dengan pendekatan sistem, maka di DKI sebenarnya telah berkembang suatu sub sistem permuseuman, hanya belum mapan sebagaimana yang diinginkan. Sebagai contoh, penempatan planetarium di kompleks Taman Ismail Marzuki, adalah tidak tepat. Planetarium harus merupakan bagian dari suatu museum ilmu dan teknologi atau bagian dari suatu science centre, atauberdiri sendiri tidak seperti yang ada sekarang ini, seakan-akan menjadi bagian dari suatu art centre.

Untuk melengkapi sistem permuseuman di Indonesia, maka sejak Pelita III mulai dirintis persiapan pendirian suatu museum ilmu dan teknologi. Mengingat nasib malang yang menimpa Museum Nasional, yang gedungnya sudah sejak sebelum peran dunia kedua sudah “monument verklaard”, tidak dapat diperluas karena tanah yang sejak semula diperuntukkan untuk perluasan museum tersebut kemudian oleh pemerintah Hindia Belanda dipakai untuk mendirikan Rechtshoge School, dan sekarang dipakai oleh Departemen Pertahanan dan Keamanan.

Suatu sistem biasanya terdiri dari unsur-unsur atau komponen-komponen yang satu sama lainnya berkaitan dan bergerak hidup seperti suatu organisme. Di dalam sistem permuseuman itu didapati komponen pembina dan komponen pelaksana. Komponen pembinanya ialah Direktorat Permuseuman. Sedangkan komponen pelaksananya ialah museum-museum segala jenis dan ukuran atau tingkatan. Organisme itu hidup. Yang membuat hidup komponen itu ialah manusia-manusia yang mengelolanya. Dan kalau dibicarakan tentang sistem permuseuman nasional, maka terlihat adanya suatu supra sistem permuseuman internasional yang digerakkan oleh UNESCO dan ICOM, maka situasinya akan memberikan gambaran cakrawala yang luas.

Orang awam masih banyak memandang museum itu hanya untuk menyimpan barang purbakala atau barang antik saja. Mereka lupa, bahwa sistem permuseuman harus relevan dengan sistem seni dan ilmu. Kalau dikembalikan pada arti mula kata museum, yakni museon yang berarti suatu kuil pemujaan para muse, sembilan dewi perlambang cabang-cabang seni dan ilmu dari mitologi Yunani, hingga sekarang lambang itu masih bermakna.

Tipologi museum ditentukan oleh klasifikasi seni dan ilmu. Sekalipun ruang lingkup geografis dan status yuridis penyelenggaraan dan pengelolaannya masih dapat dibilah-bilah menjadi pelbagai tipe dan sub tipe, namun sistemnya tetap berdasarkan sistem dan klasifikasi seni dan ilmu. Jadi sudah merupakan hal yang tepat apabila antara universitas dan museum terdapat persamaan hakikat fungsionalnya. Universitas sebagai lembaga pendidikan dan penelitian formal berhadapan dengan universe sebagai obyek kajian, maka demikian pula yang ingin dikomunikasikan atau diinformasikan oleh museum sbagai lembaga pendidikan non-formal kepada masyarakat ilmiah dan non-ilmiah, ialah tentang jagad semesta ini, tentang tata surya kita, tentang bumi kita, dan tentang manusia dan lingkungannya.

Apabila kembali disimak pidato mendiang Prof. Bosc, lima puluh tahun yang lalu, di mana telah disinggung adanya kebijakan yang mengatur tugas, hak dan fungsi-fungsi centrale musea dan locale museua, antara lain mengenai penempatan benda-benda warisan budaya, karena kemungkinan akan berhadapan dengan kepentingan perasaan kedaerahan, sehingga perlu pengaturan tersendiri, seperti misalnya reliq sejarah yang bernilai nasional ditempatkan di museum pusat sedangkan di daerah dapat ditempatkan replikanya. Hal ini sebagian sudah dapat dilaksanakan, dan sebagian lagi masih merupakan home work. Di dalam buku Pelita II dengan jelas dinyatakan dua hal penting:

- a. bahwa antara universitas dan museum perlu ada kerjasama;
- b. bahwa benda-benda warisan budaya hasil penggalian harus disimpan di museum.

Sistem permuseuman dengan sistem dan jaringan kegiatan penyelamatan dan pengkajian benda-benda budaya dewasa ini belum dapat dikatakan baik. Memang ada pembagian tugas, misalnya apa yang disebut scientific archaeology menjadi garapan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional; conservation archaeology atau public archaeology menjadi tanggung jawab Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala. Apabila museum archaeology dapat pula dikembangkan, maka Direktorat Permuseuman dengan jaringan kerjanya dalam sistem permuseuman tentu akan dapat memanfaatkannya. Tetapi mengingat jumlah dan jenis museum kian hari kian bertambah, terutama jenis museum khusus, maka museologi, sebagai disiplin komplementer bagi disiplin-disiplin ilmu lainnya, baik dari kelompok ilmu alam dan eksakta, maupun dari kelompok ilmu sosial dan budaya, baik bagi

pelbagai cabang teknologi maupun bagi pelbagai kesenian, dituntut suatu jaringan kerja antar universitas dan antar fakultas. Tentunya hal ini perlu pengamatan, pemikiran dan perencanaan kurikulumnya, tetapi juga tentang pelbagai jenis program pendidikan dan latihannya, pelbagai tujuan dan sasarannya dan sarana serta fasilitas pendukungnya.

Dalam sistem dan jaringan permuseuman di Indonesia, di samping museum-museum besar yang telah ada di kota-kota besar, seperti Jakarta, Bogor, Bandung dan Yogyakarta, saat ini sudah difungsikan 13 museum umum tingkat propinsi dan diharapkan akan sampai ke jumlah 26 buah di masa mendatang. Bermilyar-milyar rupiah telah ditanamkan sebagai modal oleh pemerintah dan masyarakat pembayar pajak di Indonesia. Kalau mau dituruti, maka hampir setiap bupati ingin mempunyai museum tingkat kabupaten. Jadi apa yang pernah disinyalir oleh mendiang Prof. Bosch lima puluh tahun yang lalu sebagai gejala museum epidemie nampaknya sekarang mulai muncul lagi. Kalau motivasinya adalah demi penyelamatan warisan budaya, maka keinginan mendirikan museum perlu mendapat tanggapan dan pertimbangan yang positif. Tetapi pada umumnya, kalangan yang penuh hasrat untuk mendirikan museum itu lupa bahwa bukan soal biaya eksploitasinya saja, tetapi faktor pengadaan tenaga personil yang ahli dan terampil dalam hal pengelolaan museum perlu difikirkan.

Dalam pelaksanaan Pelita I, di dalam kompleks halaman Museum Pusat telah dibangun gedung-gedung untuk keperluan storage koleksi studi, untuk laboratorium konservasi, bengkel preparasi serta suatu museum training centre. Dengan tersedianya dana dari anggaran pembangunan, maka telah dilaksanakan penataran-penataran tenaga teknis permuseuman, berdasarkan tiga tipe.

Tipe dasar dengan lebih kurang 100 jam pelajaran untuk jangka waktu dua minggu, diselenggarakan di daerah yang telah ada museumnya; Tipe khusus dengan 160 jam pelajaran untuk jangka waktu satu bulan, dititikberakan kepada museum management; dan Tipe Kejuruan untuk empat bidang keahlian: kuratorial, konservasi, preparasi dan edukasi, dengan 400 jam pelajaran dalam jangka waktu tiga bulan.

Program penataran tenaga teknis permuseuman itu merupakan crash program. Jadi perlu ditingkatkan dan disempurnakan. Satu-satunya jalan yang dapat ditempuh untuk peningkatan keahlian dan keterampilan di bidang museologi ialah universitas. Membangun gedung dan menyediakan sarana

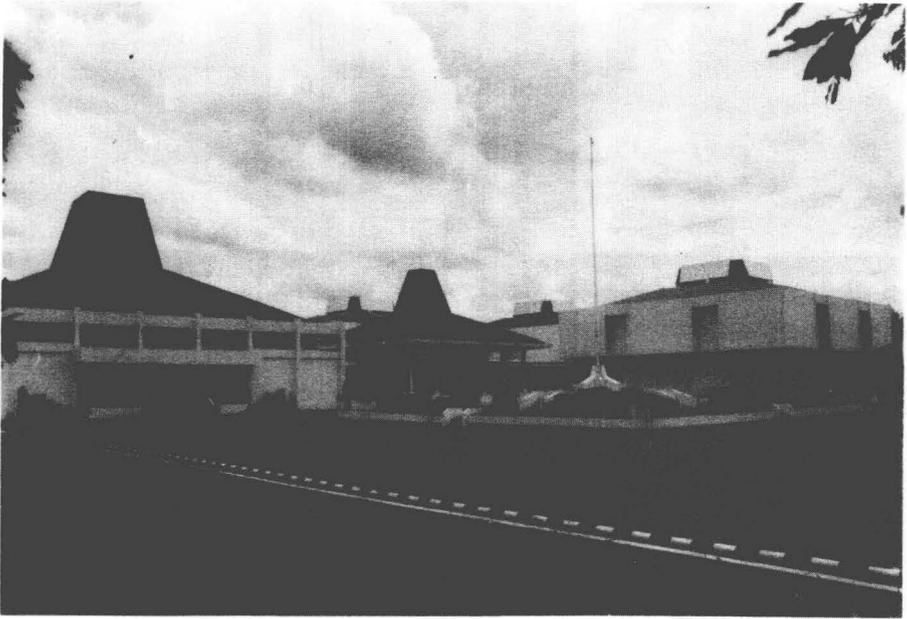
fisik lainnya, sekalipun mahal masih lebih ringan dari pada membangun dan membentuk pribadi-pribadi calon-calon pengelola museum, pengelola pelbagai kegiatan museum, yang dapat membuat museumnya hidup, bergerak, aktif dan dinamis, melaksanakan tugas dan fungsi-fungsinya di tengah-tengah masyarakat lingkungannya. Memberikan ilmu jauh lebih ringan dari pada membentuk pribadi yang berwatak. Merubah sikap perorangan yang sudah diberi tanggung jawab melalui program-program sertifikat bagi para kepala museum, sekalipun mungkin sudah mirip dengan suatu program post graduate course, menjadi pribadi-pribadi yang sesuai bagi jabatan-jabatan di akan jauh lebih berat. Sebabnya ialah, karena museum itu merupakan lembaga yang terbuka bagi umum, mudah sekali menjadi sasaran perasaan tidak puas, dan koleksinya yang berharga juga dapat mengundang pelbagai kemungkinan tindakan vandalisme dan kriminalitas. Penampilan museum hampir mirip dengan dengan penampilan yang bersifat feminim: bersih, cantik dan selalu mempunyai daya memikat.

Kembali kepada topik perkembangan dan pengembangan sistem permuseuman, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan sistem permuseuman tidak dapat dilepas begitu saja tanpa jiwa, semangat, norma dan azab, tetapi suatu sistem permuseuman harus secara sadar dikembangkan sesuai dengan keinginan bangsa dan rakyat yang memilikinya, sesuai dengan keperluan-keperluan masyarakat lingkungannya berdasarkan falsafah bangsa itu sendiri. Untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangannya, maka suatu sistem hukum dan perundang-undangan di bidang permuseuman perlu segera diwujudkan. Dan kenyataannya memang sedang dipersiapkan suatu rancangan undang-undang permuseuman. Faktor lainnya ialah faktor dinamika, yakni faktor manusia penggerakannya. Dalam hal ini universitaslah yang akan turut membantu usaha pengembangan tenaga ahli dan calon pengelola museum serta calon pengelola pelbagai kegiatan museum lainnya. Universitas bertugas untuk mengembangkan museologi, dalam hal pengembangan teori dan metodologinya. Namun, karena sifat museologi yang empirik dan normatif witu, maka kerja sama dengan Direktorat Permuseuman, instansi yang bertindak sebagai konsumen, tetapi juga yang dapat menyediakan laboratoria bagi pengembangan prakteknya, merupakan syarat-syarat mutlak yang tak dapat diabaikan.

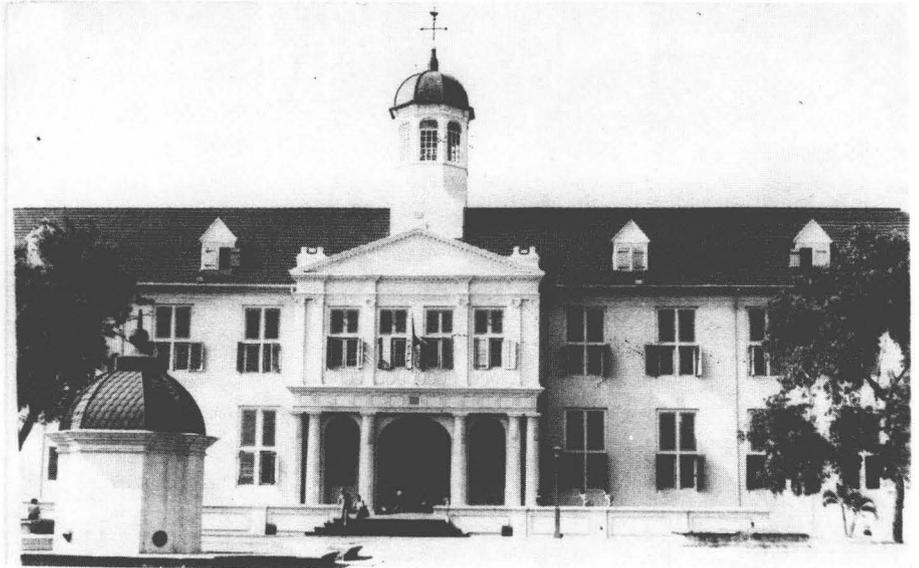
(Acara ceramah dan diskusi Jurusan Arkeologi FSUI, 26 Nopember 1985)



Museum Nasional di Jakarta dapat dipandang sebagai "Grand Mother Museum" dari museum-museum di seluruh Indonesia.



Museum Negeri Propinsi Jawa Tengah di Semarang dipandang sebagai "mother museum" dari museum-museum lokal di wilayah Jawa Tengah.



Museum Sejarah Jakarta (Museum Fatahillah), salah satu museum lokal di ibukota Jakarta.

## PERANAN MUSEUM DALAM PENDIDIKAN

Topik mengenai peranan museum dalam pendidikan, senantiasa aktual karena kedua komponen sosial budaya tersebut, yakni museum di satu pihak dan lembaga pendidikan di lain pihak, selama keduanya masih berfungsi di tengah-tengah masyarakat, maka peranannya akan tetap aktual dan terus diamati, dikaji, untuk kemudian dapat disempurnakan.

Antara museum dengan pendidikan di waktu yang lampau tidak pernah ada hubungan fungsionalnya. Pendidikan sebagai proses sosialisasi dan proses pembudayaan orang perorangan telah berlaku sejak manusia lahir, hidup bermasyarakat, dan berkebudayaan. Pendidikan menurut para ahli antropologi sering disebut *process of enculturation*. Pada saat ini pendidikan sebagai proses seringkali dikaitkan dengan pendidikan seumur hidup. Konsep pendidikan seumur hidup ternyata bukan saja hasil pemikiran ilmiah, tetapi sudah merupakan konsep religius, sehingga sudah semestinya apabila konsep yang mendapat dukungan ilmu dan agama itu dilaksanakan dengan sebaiknya. Selanjutnya perlu diingat bahwa pendidikan bukanlah pengajaran. Dalam kaitan ini, sekalipun museum memainkan peranan dalam pendidikan, museum bukan sekolah dan tidak akan menggantikan peran sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan formal. Museum memang akan tetap berperanan sebagai suatu lembaga pendidikan non-formal.

Ujaran mengenai museum sebagai suatu lembaga pendidikan non-formal adalah ujaran yang belum lama muncul di kalangan ahli permuseuman. Di dalam buku *The Museum, Its history and its tasks in Education* karangan Alma S. Wittlin (1949) disebutkan bahwa pada mulanya banyak museum didirikan bukan untuk tujuan-tujuan pendidikan dalam arti yang luas. Yang menarik adalah bahwa sekalipun sejarah pertumbuhan museum itu harus dicari di benua Eropa, tetapi justru mengenai sejarah pergerakan tentang hubungan museum dengan pendidikan ialah di benua yang baru, yakni Amerika Serikat. Dalam jangka waktu kurang dari dua abad, dengan sejarah asal-usul yang berlain-lainan. Sebagian muncul di lingkungan lembaga keilmuan seperti universitas, dari koleksi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan penelitian, yang hingga kini tetap memiliki status sebagai *university museum*; sebagian berasal dari koleksi milik perorangan kemudian dipisahkan menjadi badan hukum dengan status museum; sebagian berasal dari bekas pameran-

pameran raksasa, dan setelah pamerannya bubar benda-benda bekas pamerannya dijadikan koleksi museum. Mungkin karena Amerika Serikat adalah negara yang muda dengan bangsa yang muda, maka kesadaran sejarah telah menjadi dorongan ke arah pembentukan himpunan-himpunan sejarah *historical societies*, yang selain turut membantu usaha pelestarian bangunan-bangunan bersejarah, juga sangat memperhatikan perawatan dan pemanfaatan benda-benda bersejarah, yang kemudian dihimpun dalam museum. Seorang ahli museologi di Amerika Serikat, G. Ellis Burcaw, menulis buku yang berjudul *Intruduction to Museum Work*, diterbitkan oleh The American Association for State and Local History Nashville yang cetakan keempatnya diterbitkan pada tahun 1979. Gejala yang sama dapat diamati di negara Australia. Kesimpulannya adalah bahwa usaha pelestarian warisan alam dan warisan budaya bukan berasal dari kemauan politik penguasa, tetapi motivasinya timbul dari kalangan masyarakat sendiri.

Dari bahan kepustakaan yang ada, dapat dipelajari sejarah asal-usul museum di benua Eropa. Sebagian dari koleksi perorang-an. Misalnya pada jaman Renaissance, pelbagai cabang seni dan ilmu telah maju karena antara lain memperoleh pengayoman dari kalangan bangsawan dan hartawan. Sebagian berasal dari koleksi benda-benda aneh yang dikumpulkan oleh para musafir dan petualang dari pelbagai penjuru dunia yang mereka datangi. Koleksi museum etnologi tumbuh bersamaan dengan perkembangan ilmu bangsa-bangsa ini. Istana-istana para raja dan bangsawan setelah revolusi Perancis dinyatakan sebagai milik pemerintah dan dibuka untuk umum. Maka motivasi demokratisasi seni dan ilmu dengan museum sebagai media muncul di Eropa akibat adanya revolusi liberal.

Maju dan berkembangnya museum-museum Etnologi di Eropa tidak dapat dilepaskan dari gerak perkembangan sejarah politik kapitalisme dan kolonialisme. Dan bila sekarang diamati perkembangan museum-museum ilmu dan teknologi maka hal inipun tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan ilmu dan teknologi. Dan apabila sekarang permuseuman di Jepang dan India jauh lebih maju dari di negara-negara Asia lainnya, ini karena kedua negara tersebut telah berusaha sekuat mungkin untuk mengikuti lajunya kemajuan ilmu dan teknologi, disertai kesadaran perlunya demokratisasi ilmu dan seni. Pengertian demokratisasi seni dan ilmu dalam konteks ini adalah bahwa perkembangan seni dan ilmu jangan hanya menjadi monopoli sekelompok kecil masyarakat saja, tetapi perlu menjadi milik umum masyarakat luas. Jalan yang sebaiknya ditempuh ialah menjadikan museum sebagai medium penye-

baran informasi, antara lain melalui kegiatan pameran koleksi museum.

Namun, masih diperlukan waktu yang cukup panjang bagi para pengelola museum untuk mencapai tujuan tersebut. Pada mulanya, para pengelola museum merasa bahwa usaha mereka memajangkan pelbagai benda seni dan benda pembuktian ilmu dan teknologi di museum itu sudah cukup untuk memberikan informasi kepada pengunjung museum. Para pengelola museum, khususnya para pengelola koleksi, sangat mengetahui tentang koleksi asuhannya, tetapi mereka awam dalam hal yang berkaitan dengan pengunjung museum. Didorong oleh keinginan agar pengunjung museum itu dapat lebih menghayati benda-benda yang dipamerkan, maka usaha pertama yang dilakukan ialah menyediakan petugas yang khusus disertai pekerjaan menuntun pengunjung. Dengan demikian, pada akhirnya yang akan berbicara bukan koleksi yang dipamerkannya melainkan seorang penuntun yang dijadikan juru bicara atau penyambung lidahnya.

Dilakukannya penelitian terhadap apa yang disebut publik museum, disebabkan oleh adanya perhatian dari pihak pengelola dan penyelenggara museum, untuk meningkatkan pelayanan kepada pengunjung yang sikap dan pandangannya terhadap museum semakin kritis. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa apa yang disebut publik museum itu secara empiris tidak ada. Publik pengunjung museum bukanlah merupakan sesuatu yang utuh yang dapat dijadikan obyek kajian secara terpadu, karena sifatnya terlalu heterogin. Sasaran penelitian tidak terbatas pada publik pengunjung museum saja, melainkan juga masyarakat lingkungan museum. Di Eropa yang sudah maju itu, hasilnya cukup mencengangkan sebab lebih dari enam puluh persen penduduk suatu komunitas tertentu ternyata belum pernah mengunjungi museum.

Penelitian yang sama dapat pula dilakukan di sini, melalui cara mengunjungi secara langsung dari rumah ke rumah dan menanyakan kepada penghuninya apakah mereka pernah ke museum? Meningkatnya jumlah pelajar atau siswa yang mengunjungi museum, itu disebabkan karena adanya instruksi dari Kakanwil Depdikbud setempat untuk kegiatan wajib kunjung museum. Padahal konsepsi kita, mengunjungi museum itu ibarat membaca surat kabar, mendengarkan radio atau menonton TV yang kesemuanya didorong oleh rasa suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pada hakekatnya museum berbeda dari sekolah. Walaupun keduanya sama-sama merupakan tempat untuk menambah ilmu dan pengetahuan, tetapi

kalau sekolah memiliki seperangkat aturan dengan disiplin dan sanksi-sanksinya. Sedangkan di museum masyarakat bebas untuk mengunjungi dan memanfaatkannya.

Merupakan sesuatu yang mubazir apabila museum yang didirikan dengan biaya, tenaga, dan waktu yang tidak sedikit itu tidak pernah dikunjungi orang, hanya semata-mata karena masyarakat lingkungannya belum merasakan perlunya kehadiran museum sebagai kebutuhan hidup. Di satu pihak penyelenggara dan pengelola museum berambisi agar museum benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat pada hal di pihak lain masyarakat sendiri tidak merasakan manfaat tersebut. Apabila ini terjadi, itu berarti ada kesenjangan komunikasi.

Hal tersebut menyadarkan para penyelenggara dan pengelola museum bahwa sebenarnya tugas museum itu antara lain juga mengkomunikasikan benda koleksinya kepada publik museum. Tugas demikian tersebut memang mudah untuk dinyatakan dengan kata-kata, tetapi di dalam praktek tentu tidak semudah yang kita bayangkan. Alma S. Wittlin dalam karangannya yang sudah disinggung di atas memaklumi akan hal ini, ia membuat analogi antara buku dengan pembacanya dengan pameran koleksi dengan pengunjung museum. (1949:183).

Sudah dimaklumi secara luas, bahwa buku memainkan peranan penting dalam hal penyampaian informasi pelbagai cabang seni dan ilmu pengetahuan. Tetapi suatu proses kegiatan yang gigih perlu digerakkan terlebih dahulu sehingga masyarakat pada akhirnya menganggap bahwa buku itu merupakan salah satu dari pada kebutuhan hidupnya. Minat baca merupakan prasyarat bagi peranan buku sebagai media untuk menambah pengetahuan dalam rangka proses pendidikan seumur hidup. Kita tahu, bahwa Kartini, yang hanya bermodalkan pendidikan sekolah rendah, dapat menumbuhkan atau mengembangkan pengetahuan dan kepribadiannya begitu hebat, dengan memanfaatkan dua jenis komunikasi: korespondensi dan minat baca. Korespondensi dan membaca memerlukan tingkatan imajinasi tertentu. Dan, museum karena memiliki koleksi benda pembuktian faktual tentang kehadiran manusia dan lingkungan hidupnya, harus merasa lebih beruntung. Dengan tingkatan imajinasi yang tidak tinggi museum dapat mengembangkan potensi komunikasi visual. Dan inilah tantangan bagi setiap museum. Menguasai teknologi komunikasi visual atau menguasai teknologi presentasi benda tiga dimensi. Kalau sebuah buku, isinya menuruti sistem kaidah tertentu karena

sudah memiliki metode dan teknik penyajian agar dapat berkomunikasi dengan pembacanya, maka setiap presentasi koleksi dalam suatu sajian pameran di museum kira-kira demikian pula seharusnya.

Demikianlah, maka di dalam sistem pengelolaan museum, terdapat suatu pergeseran penekanan pembagian dan pelaksanaan tugas. Jelas, bahwa setiap museum, bagaimanapun dasar dan tujuan penyelenggaraannya, karakteristik utama sebagai lembaga ilmiah, yang menghimpun, mencatat, merawat dan mengkaji benda-benda pembuktian kehadiran manusia dan lingkungannya, hingga saat ini memang masih dominan. Namun, peranannya di tengah-tengah masyarakat di era demokrasi dewasa ini perlu diperluas hingga dapat memberikan refleksi kepada tujuan yang bersifat demokratis pula, yakni perataan pemberian kemudahan bagi penyebarluasan pengetahuan tentang pelbagai kemajuan cabang ilmu dan penikmatan dan penghayatan pelbagai cabang kesenian. Perataan pemberian kemudahan seperti demikian itu baru dapat dilaksanakan oleh museum yang sudah disiapkan kehadiran dan peranannya supaya dapat disesuaikan dengan sistem pendidikan di masyarakat yang mencerminkan watak-watak yang demokratis. Maka kemudian kita tidak usah merasa heran, apabila di kalangan ahli permuseuman dilakukan pelbagai diskusi dan pendekatan untuk mencapai kata sepakat mengenai dasar dan tujuan penyelenggaraan museum. Dan ini baru tercermin setelah ICOM (*International Council of Museums*) melakukan perubahan rumusan tentang definisi museum, pada tahun 1974. Naskah rumusan tersebut sebagai berikut: A museum is a non-profit making, permanent institution in the service of society and of its development, and open to the public, which acquires, conserves, communicates and exhibits, for purposes of study, education and enjoyment, material evidence of man and environment.

Kalau disimak dengan seksama, maka di dalam rumusan tersebut telah tersirat falsafah museum yang begitu umum, sehingga dapat diterima oleh negara-negara baik yang berideologi liberal-kapitalis, maupun sosialis-komunis. Bagi kita yang memiliki falsafah Pancasila, falsafah museum tersebut tidak membahayakan, dengan syarat, bahwa latar belakang rumusan itu berpijak pada pola pemikiran ilmiah semata, sebab koleksi museum dibatasi pada obyek keguatan ilmiah yakni mengenai manusia dan lingkungannya. Tetapi patut kita berikan dasar lain yakni dasar yang ditimbulkan oleh iman kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari segala kegiatan lainnya, kegiatan akibat dari interaksi manusia dengan lingkungannya, dan segala hasil yang dicapai manusia adalah akibat dari adanya interaksi tersebut. Kalau

tidak, maka kita akan terjebak pada dasar dan cara berpikir yang materialistis saja. Itulah sebabnya, maka kita telah dapayt melahirkan konsepsi museum umum, bukan museum yang memiliki koleksi dengan sifat multidisipliner, tetapi koleksi yang berhubungan dengan pola berfikir interdisipliner, suatu *integrated museum*. Museum yang demikian ini dapat memberikan peluang untuk menjabarkan secara visual mengenai kehadiran manusia dan alam lingkungannya, baik lingkungan alamiahnya yang memberikan segala sumber daya hidup, maupun mengenai lingkungan sosial-budayanya.

Apabila Alma S. Wittlin telah membuat suatu sistem klasifikasi museum dengan dasar pertimbangan yang dikaitkan dengan tujuan-tujuan pendidikan menjadi: (1) *storehouse museums* dan (2) *display museums* yang meliputi sub tipe (2.1.) *research museums*; (2.2.) *student galleries*; (2.3.) *centres of training in basic facts*; (2.4.) *museums for the general public*; (2.5) *museum services for children*; jadi sistem klasifikasi yang ia ketengahkan pada tahun 1949, maka dengan rumusan mutakhir ICOM mengenai museum dalam tahun 1979 itu, kita justru tidak perlu membuat klasifikasi berdasarkan tugas-tugas khususnya, tetapi akan tetap menyusun klasifikasi yang mengkaitkan jenis koleksi dengan disiplin ilmu atau cabang seni yang ada, sehingga kita akan mengenal: (1) *general museums* dan (2) *specialized museums*. Cara pembagian ini dapat diteruskan dalam detail, tetapi dengan anggapan, bahwa semua jenis museum mempunyai tugas umum yang sama: melayani masyarakat dan kemajuannya untuk tujuan-tujuan studi, pendidikan dan kesenangan.

Perlu diperhatikan, ujaran para ahli museologi yang menyatakan, bahwa apa yang dinamakan publik itu sebagai obyek kajian sebenarnya tidak ada, karena watak yang tidak utuh sebagai satuan teknis sosial. Keneth Hudson, dalam bukunya yang berjudul: *Museums for the 1980's. A Survey of World Trends*, menyatakan:

“The public, as a homogeneous unit, does not exist, and it is waste of time to search for it or not attempt to cater for its needs.” (1977:10).

Yang dapat kita lakukan ialah mengenal macam-macam motivasi untuk mengunjungi museum, di kalangan publik museum. Jadi konkritnya, bukan hanya publik yang mengunjungi museum itu saja yang menjadi sasaran penelitian tetapi seluruh masyarakat lingkungan museum itu harus pula dijadikan sasaran penelitian tentang keperluan-keperluannya bagi suatu kunjungan ke museum. Karena masyarakat luas itu dalam kenyataannya dapat dibagi menjadi pelbagai kelompok berdasarkan latar belakang pendidikan,

pekerjaan, umur dan lain-lain, maka barulah pihak pengelola museum dapat menyusun strategi global, bagaimanakah museum dapat memberikan pelayanannya dan program-program apakah atau topik-topik presentasi koleksi yang mana yang dapat disuguhkan. Karena itu, sejak semula ditekankan bahwa museum itu bukan sekolah, sebab masyarakat sekolah hanya merupakan suatu sub-kelompok saja dari calon pengunjung museum. Tetapi, dengan sistem klasifikasi museum dan koleksinya yang didasarkan kepada adanya pelbagai cabang seni dan ilmu, maka setiap individu, baik dari masyarakat sekolah, maupun dari bukan masyarakat sekolah, akan menarik manfaat untuk menambah penalaran kognitif mereka akan harta penalaran kognitif umat manusia secara keseluruhan. Untuk mencapai tujuan itu, maka pihak pengelola museum menyusun pelbagai metode dan teknik presentasi, yang sudah tentu diintegrasikan dengan pelbagai metode dan didaktik presentasi dan komunikasi.

Dewasa ini konsepsi yang sedang dikembangkan oleh kalangan per-museumian ialah apa yang dinamakan “public oriented museum policies”, yakni ujaran yang dapat dijabarkan, bahwa kebijaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan museum yang berorientasi kepada kepentingan publik museum atau masyarakat lingkungan museum. Kalau konsep ini akan kita kembangkan pula di Indonesia, maka kita harus siap untuk mengetahui kebutuhan masyarakat lingkungan museum yang dikaitkan dengan kehadiran museum di tengah masyarakat tersebut. Dilihat dari segi kebutuhan pendidikan misalnya, pihak pengelola museum harus terjun ke lapangan dengan mengunjungi lembaga pendidikan formal, yang kurikulum dan silabusnya dapat direntangkan dengan kasanah koleksi museum yang ada, dan mencoba menyusun pelbagai program kerjasama dalam persiapan pameran-pameran kontemporer yang aktual dan faktual, sehingga antara bahan atau bahasan pelajaran tertentu dengan materi pameran terdapat korelasi. Hal ini akan menciptakan suasana saling mendukung dalam kegiatan edukatif. Tetapi pihak pengelola museum juga dapat terjun ke masyarakat dan mencoba melakukan penelitian tentang pelbagai kebutuhan dari kelompok-kelompok sosial berdasarkan lingkungan pekerjaan, lingkungan sosial ekonomi, dan mencoba melakukan pelbagai pendekatan dan diskusi, pelbagai macam rekreasi lewat program-program pameran kontemporer, yang dapat mendorong sikap dan perilaku yang produktif dan kreatif.

Arah perkembangan kebijaksanaan museum yang demikian itu, artinya bahwa kebijaksanaan pengelolaan museum itu harus berorientasi kepada kepentingan masyarakat membawa pelbagai konsekuensi yang tidak akan

membuat kita berpangku tangan. Syarat pertama ialah, bahwa pihak museum, dengan seluruh staf pengelolanya, harus sudah siap siaga atau menyiapkan museum, sarana, fasilitas serta program-program kegiatannya, untuk melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ini berarti, bahwa staf pengelola museum harus menguasai pelbagai teori komunikasi, metode dan teknik presentasi dan edukasi - museum didactics - sebagai persiapan internal. Dan ditambah persiapan eksternal, yakni menyiapkan calon-calon publik museum melalui kegiatan survai dan penelitian di kalangan masyarakat untuk menjajagi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang dapat dilayani oleh museum - apapun jenis koleksinya - sehingga pengetahuan tentang apa yang disebut “pemasaran” atau “marketing” dari jargon manajemen ekonomi perusahaan, rupa-rupanya perlu juga diketahui oleh orang museum. Memang sudah menjadi gejala umum, bahwa museum-museum besar di saat ini sudah memiliki personil khusus di bidang hubungan masyarakat (public relations). Tetapi tugas humas dengan pemasaran berlainan sekali. Tugas pemasaran museum terbatas untuk menyebarluaskan pelbagai kegiatan museum kepada masyarakat untuk menarik sebanyak mungkin pengunjung. Tetapi tugas penelitian “kebutuhan masyarakat terhadap museum” bukan tugas humas, melainkan tugas penelitian bidang studi ilmu-ilmu sosial dan museologi (etno-museologi).

Selanjutnya beralih kepada bidang pendidikan. Tanpa menyinggung pendapat Iwan Illich dalam salah satu bukunya yang berjudul “*Bebas Sekolah*” (aslinya berjudul: *The Deschooling Society*) mengenai boros dan ketiadagunaannya sistem pendidikan formal, khususnya bagi masyarakat dunia ketiga, di sini kita sudah mengfhadap kenyataan pahit, yakni adanya pengangguran lulusan perguruan tinggi yang jumlahnya ribuan. Menghadapi kenyataan ini seharusnya segera kita melakukan oto-kritik: di mana kesalahan atau kelemahan sistem pendidikan formal? Yang jelas ialah, bahwa ada gejala sistem pendidikan formal kita sudah terjauhkan dari lingkungan hidupnya. Terutama di kota-kota besar kita lihat gejala masyarakat yang bersikap konsumtif. Masyarakat diberi pelbagai suguhan yang atraktif konsumtif, bukannya yang atraktif rekreatif. Lalu bagaimana halnya dengan cita-cita kita untuk mengisi alam kemerdekaan dengan pelbagai kegiatan produktif-rekreatif yang menjadi ciri masyarakat yang memiliki kualitas hidup? walaupun benar, bahwa itu semua adalah merupakan gambaran masyarakat atau kebudayaan kota yang merupakan sub kultur minoritas jika dibandingkan dengan mayoritas lain yang menopang kebudayaan majemuk agraris maritim. Tetapi tidak boleh dilupakan, bahwa dalam satu masyarakat

panutan seperti yang gejalanya masih hadir di tengah kita, bagaimanapun juga gambaran masyarakat dan budaya kota tersebar luas melalui pelbagai media masa. Karena itu suatu gerakan yang berupa “klompencapir” patut mendapat penghargaan yang sebaik-baiknya. Hal-hal yang faktual dan aktual dijadikan suguhan dan garapan masyarakat pedesaan dengan memanfaatkan media masa dan ternyata dapat menghasilkan peningkatan kualitas hidup. Di sini kita lihat adanya analogi antara media masa dengan museum sebagai sarana pendidikan non-formal.

Perlu diingat bahwa untuk mencerdaskan bangsa, sistem pendidikan memiliki dua jalur yaitu jalur pendidikan formal dari TK sampai perguruan tinggi, dan jalur non-formal melalui media masa (koran, majalah, radio, TV dan film), perpustakaan dan museum. Kalau media masa dapat memainkan peranan positif dalam bidang pendidikan dalam kaitan dengan upaya mencerdaskan bangsa, tentu dapat juga dibuat analogi bahwa perpustakaan dan museum, dapat memainkan peranannya yang cukup aktif. Dan hal ini tergantung dari para pengelolanya, sudah siap dan tanggapkah terhadap segala gejala, gejalok dan kepeluan masyarakat lingkungannya? Sejarah telah memperlihatkan kepada kita bahwa kita tidak pernah terkucil dari pelbagai peristiwa yang terjadi di atas panggung sejarah dunia. Sistem komunikasi dan informasi saat ini sudah sampai kepada tingkatan pemanfaatan teknologi yang serba canggih. Kita, misalnya, tidak perlu merisaukan peristiwa peringatan lima puluh tahun Polemik Kebudayaan, yang telah begitu meramaikan media masa beberapa waktu yang lalu. Sebagai warga Taman Siswa kita tetap memiliki keyakinan, bahwa banyak yang dikemukakan mengenai ujaran dan konsep-konsep Ki Hadjar Dewantara itu sebenarnya kurang tepat, sebab pelbagai teori Ki Hadjar Dewantara mengenai pendidikan dan kebudayaan tidak pernah mencerminkan sikap kebangsaan yang sempit. Menurut saya, dan marilah sekarang kita beralih kepada hal-hal yang lebih konkrit dan praktis, pelbagai teori Ki Hadjar Dewantara mengenai pendidikan, seperti sistem among dan sistem tri-pusat, masih relevan. Kalaupun masih mendukung nilai-nilai paternalisme, namun, bila kita menyadari akan unsur-unsurnya yang negatif, maka tentunya kita hanya akan mengembangkan unsur-unsurnya yang positif saja. Dan sistem among serta sistem tri-pusat itu dapat kita coba untuk diterapkan di bidang didaktik museum. Kalau kita menyadari, bahwa museum itu sebenarnya dapat pula berperan sebagai suatu peguron bagi masyarakat lingkungannya, maka dengan sendirinya, para anggota staf pengelola museum itu pun dapat kiranya memandang dirinya sebagai pamong

juga. Tetapi bukan pamong yang melayani para siswa dengan proses belajar-mengajar klasikal dan non-klasikal, melainkan sebagai pamong yang sedang melayani publik museum. Untuk dapat melayani para pengunjung museum semaksimal mungkin, diharapkan mereka memiliki penalaran kognitif yang bersifat ensiklopedik. Dan ini hanya dapat dicapai oleh staf pengelola museum yang memiliki dan menguasai bahan kepustakaan rujukan yang cukup ampuh, luas dan up to date. Karenanya, saya selalu menganjurkan supaya perpustakaan museum juga dilengkapi dengan bahan rujukan seperti pelbagai ensiklopedia yang serba lengkap. Orang yang luas pengetahuannya karena telah memiliki minat baca yang luas, biasanya juga akan selalu penuh dengan pelbagai gagasan. Dan orang yang selalu penuh dengan gagasan biasanya tidak pernah tinggal diam. Ia akan menjadi kreatif dan produktif. Sebab ia tidak akan henti-hentinya untuk menyampaikan gagasan-gagasan dan prakarsa-prakarsanya kepada teman-teman sejawatnya. Hanya kepada orang-orang yang demikian itulah maka kita dapat berbicara tentang wawasan-wawasan yang dikaitkan dengan tahun 2000. Saya rasa, sekarang ini di tiap sekolah sudah memiliki himpunan pelajar, sebagai salah satu komponen dalam kerangka sistem tripusatnya KHD. Baik pamong di lingkungan sekolah, maupun pamong di lingkungan museum, maka kita sudah dapat melontarkan pelbagai masalah, wawasan dan kemungkinan-kemungkinan bagi tahun 2000 itu kepada para remaja kita. Sebab merekalah yang akan membentuk masyarakat tahun 2000 itu. Apakah mereka juga telah berpikir ke arah itu? merupakan kuajiban kita untuk bertanya kepada mereka.

Dalam kaitan dengan topik makalah ini, baik kelompok pamong Taman-siswa maupun kelompok pengelola museum, diajak untuk mewujudkan suatu program kerjasama antara museum dengan kelompok himpunan siswa dalam bentuk mencoba memikirkan dan kemudian menampilkan topik mengenai akan bagaimanakah sikap manusia dalam hal pelestarian lingkungan hidup dalam menghadapi masalah keperluan energi dalam tahun 2000an. Dari mulai proses pemunculan gagasan sampai kepada penjabaran masalah dalam bentuk suatu pameran kontemporer, baik dengan memanfaatkan koleksi tradisional sampai kepada bahan pameran non-koleksi museum. Untuk suatu permainan museum seperti museum-game diperlukan pengetahuan kognitif multidisipliner. Dan bisa dibayangkan, betapa sibuknya para siswa itu menyibukkan para pamongnya, di sekolah dan di museum.

Topik yang lain dapat juga dipilih, seperti halnya pada beberapa tahun yang lalu di Museum Sonobudoyo Yogyakarta, pernah diselenggarakan

pameran khusus mengenai permainan tradisional. Perlu dicoba untuk melontarkan gagasan kepada para siswa sanggupkah mereka menciptakan permainan anak-anak balita untuk tahun 2000-an, yang sifatnya tidak konsumtif, tetapi yang justru harus merangsang sikap kreatif. Hal ini perlu karena dalam kenyataan saat ini, permainan yang tersedia di toko dan plaza di kota-kota besar tidak semuanya dapat merangsang anak-anak ke arah sikap kreatif. Topik ini tepat untuk dicoba diproyeksikan dalam bentuk kerja sama museum dengan himpunan siswa.

Jadi, sebenarnya banyak hal dan gagasan-gagasan yang dapat ditampilkan untuk membuktikan bahwa museum dapat berperan aktif dalam pendidikan. Di bagian atas sudah dijelaskan bahwa kedua komponen yaitu museum dan pendidikan dapat dituangkan dalam suatu sistem kerjasama yang masing-masing komponennya dapat berperan sama aktifnya.

(Ceramah di Ibu Pawaiyan Tamansiswa, Yogyakarta, 26 April 1986)



Pameran Keliling dengan tema PSPB adalah salah satu bentuk dari upaya museum dalam partisipasinya kepada dunia pendidikan.



Bentuk yang lain dari partisipasi museum pada dunia pendidikan adalah melalui bimbingan edukatif kultural dan ceramah-ceramah bagi para siswa sekolah.

## PROFESIONALISME DI MUSEUM

Kata profesionalisme berasal dari bahasa Inggris profession. Menurut kamus kata tersebut berarti pernyataan secara terbuka sebagai pemeluk agama tertentu, atau pengakuan. Dapat pula berarti jenis pekerjaan, jenis golongan lapisan sosial tertentu. Arti yang lain adalah golongan ahli, termasuk pemain teater. The (learned) professions artinya jenis-jenis pekerjaan keahlian yang terpelajar. Sedangkan kata professional artinya seseorang yang memiliki kejuruan, keahlian. Termasuk ke dalam golongan profesional terpelajar ialah mereka yang melakukan pekerjaan sebagai pendeta, pengacara, dokter. Tetapi arti lainnya ialah seorang ahli: pemain yang ahli. Pada akhir-akhir ini kata profesional sering digunakan untuk membedakannya dengan amatir, antara lain di bidang olah raga. Kata professor juga ada kaitannya dengan asal kata profession itu tadi, yakni seorang gurubesar di perguruan tinggi yang melakukan tugas-tugas penelitian dan pendidikan di bidang keahliannya. Sedangkan kata profesionalisme berarti suatu paham atau anggapan mengenai pentingnya peranan atau pekerjaan dalam bidang apapun yang harus dikelola secara efisien dan efektif melalui tenaga-tenaga yang profesional, bukan tenaga-tenaga yang “amatiran”. Pengertian ini dipakai untuk sementara untuk acuan dalam pembahasan selanjutnya.

Demikian pula halnya di bidang permuseuman, khususnya yang menyangkut bidang museum management, bidang yang berkaitan dengan segala hal mengenai pengelolaan museum, diperlukan tenaga-tenaga yang profesional. Di kalangan permuseuman ada istilah ‘museum profession’ dan sekaligus juga sedang dikembangkan konsepsi-konsepsi tentang kode etiknya. Tetapi sebelum uraian ini dilanjutkan, perlu lebih dulu diketengahkan pertanyaan kapan dimulainya profesionalisme di museum?. Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu lebih dulu diketahui, bahwa antara profesi museum dan museumnya yang muncul lebih dulu adalah museumnya. Hal ini sama dengan kisah muncul dan berkembangnya industri otomotif. Melalui usaha yang keras, seseorang telah berhasil menciptakan sebuah mobil untuk yang pertamakalinya. Dalam perkembangannya sampai dengan saat ini diketahui bahwa untuk bisa bergerak dan berjalan, mobil tersebut memerlukan berbagai komponen pendukung. Untuk keperluan pemeliharanya sesuai dengan jenis-jenis komponen pendukungnya maka diperlukan bermacam-

macam keahlian dan spesialisasi menurut masing-masing jenis komponennya. Seperti misalnya kalau karburator mobil itu mengalami gangguan maka ada montir khusus yang menanganinya demikian pula komponen yang lain.

Kisah tentang museum pun demikian, mula-mula dimulai dengan orang-orang yang senang mengumpulkan benda alam dan benda budaya atau obyek-obyek kesenian yang kemudian berkembang sebagai koleksi museum. Alma S. Wittlin merumuskan tentang koleksi ini sebagai berikut:

- (1) Economic Hoard Colollection;
- (2) Social prestige collection;
- (3) Magic Collection;
- (4) Collections as an expression of Group Loyalty;
- (5) Collections stimulating Curiosity and Inquire;
- (6) Collections of Art Stimulating Emotional Experience.

Selain itu juga diuraikan secara panjang lebar mengenai latar belakang sejarah museum yang diselenggarakan oleh pihak penguasa (public museums), antara lain Ashmolean Museum, Oxford, didirikan tahun 1683; British Museum, London, didirikan tahun 1759; Balvedere, Wina, didirikan tahun 1781; Louvre, Paris, didirikan tahun 1793; Prado, Madrid, didirikan tahun 1819; Altes Museum, Berlin, didirikan tahun 1830. Pada umumnya museum-museum tersebut mencerminkan martabat negara-negara pemiliknya, dan berasal koleksi para raja, bangsawan, hartawan, yang sesudah jaman kecerahan dan timbulnya kesadaran demokrasi dan liberalisme dijadikan milik negara dan terbuka bagi umum.

Gerakan-gerakan masyarakat di Eropa di bidang ilmu dan kesenian ditandai dengan didirikannya lembaga-lembaga dan himpunan untuk memajukan kesenian dan ilmu pengetahuan, dan sekaligus memulai dengan mendirikan museum dan perpustakaan bagi kelengkapan sarana usaha pengembangan cabang kesenian dan ilmu pengetahuan tersebut. Maka muncullah apa yang disebut institutional museums. Khususnya di Amerika Serikat, tidak sedikit universitas yang melengkapi sarana penelitian mereka dengan apa yang disebut university museums.

Perluasan kontak antar-bangsa dan perkembangan industri, telah menimbulkan dua jenis museum, yakni museum-museum etnologi, dan

museum-museum ilmu dan teknologi. Tidak jarang, bahwa bahan bekas pameran-pameran yang bercorak internasional, kemudian dijadikan inti koleksi museum besar.

Alma S. Wittlin juga menyatakan bahwa jaman sampai meletusnya perang dunia pertama (1914) sebagai periode pertama suatu gerakan usaha perkembangan dan reformasi permuseuman di seluruh dunia. Jumlah museum di antara tahun 1850 dan 1914 di pelbagai negara di Eropa dan Amerika meningkat. Di Inggris saja jumlahnya meningkat dari 59 museum di tahun 1850 menjadi 295 museum di tahun 1914. Di Jerman terdapat 15 museum di tahun 1820 menjadi 179 museum pada tahun 1914. Jumlah yang sama dapat dilihat di Amerika Serikat pada tahun 1914.

Di Inggris sudah dimulai dengan sistem klasifikasi museum menjadi (a) The National Museum (seringkali diacukan kepada museum sejarah); (b) The Ethnological Museum; (c) The Museum of Science; (d) The Museum of Arts and Crafts.

Dalam periode tersebut orang-orang sudah mulai “mengartikan” museum. Misalnya karya tulis D. Murray yang berjudul *Museums, their History and their Use* (1904) merumuskan arti museum sebagai berikut: “A museum, as now understood, is a collection of the monuments of antiquity or of other objects interesting to the scholar and the man of science, arranged and displayed with scientific method.” Perumusan yang demikian ini juga dapat ditafsirkan sebagai pertanda jaman, yakni bahwa koleksi museum adalah sarana kelengkapan kegiatan ilmiah, dan tujuan presentasi koleksi belum dikaitkan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat luas yang awam tetapi yang perlu dilibatkan dalam proses penyebaran informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Tidaklah mengherankan, bahwa museum-museum ketika itu layaknya seperti gudang saja, hanya tunduk kepada sistem dan klasifikasi tempat, sejarah, jenis obyek-obyek kajian ilmiah.

Sebagai periode kedua dalam kerangka usaha perkembangan dan informasi, Alma S. Wittlin mengemukakan jaman di antara dua perang dunia (1914-1940). Di Soviet perubahan itu kentara karena terjadinya revolusi Bolsjewik. Dasar dan tujuan penyelenggaraan museum bukan lagi untuk mencerminkan kebesaran keluarga Tsar sebagai penguasa, tetapi khazanah sejarah dan budaya tetap dilestarikan di pelbagai museum besar sebagai milik bangsa. Jumlah museum di Soviet pada tahun 1917 adalah 114, dan pada tahun 1934 menjadi 738. Di Amerika Serikat - sebagai perbandingan

pada tahun 1919 terdapat 600 museum, pada tahun 1940 terdapat 2.500 dan dalam tahun 1965 sudah mencapai jumlah 5.000 museum. Kembali ke Soviet, usaha presentasi warisan budaya di pelbagai museum itu disesuaikan dengan kebijaksanaan politik pemerintah, yakni obyek-obyek seni misalnya digunakan sebagai media informasi tentang jaman-jaman sesuai dengan sejarah perkembangan masyarakat menurut teori Marxisme dan terdapat usaha pengurangan upaya menjelaskan nilai-nilai estetikanya.

Alma S. Wittlin kemudian mengemukakan perkembangan permuseuman di Italia, yang menurut observasinya, berkaitan erat dengan perkembangan politik fasisme Italia, dan bahwa fungsi-fungsi edukatif museum di Italia dikendalikan untuk kepentingan pengokohan aliran politik penguasa Italia ketika itu. Ia antara lain menulis:

Summing up, the purpose of the Fascist Italian museums was the education of the masses. It was a special kind of education, a subordination of interests to a single master idea: Italy's political mission to regain the position of world empire, as dedicated by the destiny of Rome."

Demikian pula uraiannya mengenai permuseuman di Jerman semasa penguasa Nazi berkuasa. Dua jenis museum dikembangkan, yakni Fatherland Museum (Heimatismuseum) dan Army Museum (Heeresmuseum). Faham realisme diungkapkan melalui usaha kegiatan edukatif museum yang berusaha menanamkan keyakinan di antara para remaja tentang asal-usul mereka dari ras Aria yang unggul.

Mengenai perkembangan museum di Amerika Serikat, Alma S. Wittlin, mengungkapkan falsafah demokrasi yang dianut di negeri itu. Ia mengutip beberapa pendapat ahli museum Amerika Serikat. Yang pertama ingin membedakan pendapat orang Inggris dari orang Amerika tentang museum. Di Inggris orang menekankan peranan arti koleksi, tetapi di Amerika yang harus berperan adalah musuemnya. Yang kedua ialah ungkapan L.V. Coleman yang menjadi terkenal, yang berbunyi: "The American musuem is ..... neither and abandoned European palace nor a solution for storing .... national wealth ..... It is an American phenomenon developed by the people, and of the people." Kemudian ia memberikan gambaran usaha-usaha kegiatan edukatif musuem-museum di Amerika Serikat. Memang perlu diakui, bahwa kegiatan

edukatif-kultural museum di Amerika Serikat inilah, yang sudah dimulai sejak sebelum perang dunia kedua, pada akhirnya menjadi bahan inspirasi bagi kompleks kegiatan edukatif museum-museum di Eropa di jaman setelah berakhirnya perang dunia kedua. Dan melalui ICOM (The International Council of Museums), didirikan setelah UNESCO mulai aktif bekerja, maka fungsi-fungsi pelayanan museum untuk kepentingan publik mulai berkembang.

Jelas, bahwa hampir setiap negara, setiap bangsa, meninggalkan jejaknya atau coraknya yang khusus pada usaha-usaha berfungsinya dan berperannya museum di masyarakat. Inggris menekankan pesan ilmiah, Jerman, Italia dan Soviet, menekankan pesan ideologi politik, dan Amerika Serikat menjagokan dirinya sebagai pelopor demokrasi. Sekalipun sebelum perang dunia kedua sudah berdiri himpunan atau asosiasi museum, misalnya di Inggris dan Amerika Serikat, namun baru setelah perang dunia kedua, setelah ICOM didirikan, maka di samping setiap negara anggota PBB cq UNESCO mulai memiliki National Committee ICOM masing-masing, maka setiap negara kelihatan mulai pula mendirikan asosiasi museum sebagai wadah bersatunya museum-museum dan wadah profesi para ahli dan karyawan museum.

The British Museum Association dan The American Association of Museums ternyata telah memainkan peranan sangat penting bagi usaha pengembangan profesionalisme di museum. pelopor-pelopor museologi bukannya lahir di masyarakat perguruan tinggi, tetapi museologi lahir atas usaha para kepala dan karyawan museum. Kedua asosiasi museum tersebut di atas menyelenggarakan kursus-kursus keahlian dan kejuruan bagi anggota asosiasi dan kedua perkumpulan itu juga menerbitkan majalah dan buku-buku profesional di bidang museologi. Sampai sekarang, sekalipun di beberapa universitas, baik di Inggris maupun di Amerika Serikat, sudah ada pelajaran museologi, namun kursus-kursus, pendidikan dan latihan yang diselenggarakan oleh kedua asosiasi itu, yang sertifikatnya diakui oleh masyarakat dan pemerintah, masih tetap dijalankan.

Di kawasan Asia, baru Jepang dan India, telah mengembangkan museologi lewat jalur formal. Tetapi juga Indian Museum Association masih tetap berperanan dalam hal menyelenggarakan pekan-pekan orientasi, penataran, seminar, diskusi, penerbitan, yang bukan saja bertujuan memajukan keahlian dan keterampilan para karyawan museum menuju penyempurnaan profesionalisme mereka, namun juga secara praktis mengembangkan museologi. Hubungan antara universitas, museum dan asosiasi museum dijalin

sedemikian rupa, sehingga menguntungkan semua pihak.

Di lingkungan ICOM telah didirikan pelbagai International Committees, misalnya: (a) Applied Art; (b) Archaeology and History (ICMAH); (c) Architecture and Museum Techniques (ICAMT); (d) Conservation; (e) Costume; (f) Documentation (CIDOC); (g) Education and Cultural Action (CECA); (h) Ethnography (ICME); (i) Glass Museums and Collection; (j) International Art Exhibitions; (k) Literature Museums; (l) Modern Art Museums; (m) Natural History Museums; (n) Musical Instruments; (o) Regional Museums; (p) Science and Technology Museums (CIMUSET); (q) Public Relations; (r) Security (ICMS); (s) Training of Personnel; (t) Museology (ICOFOM).

Sebetulnya, maka komite-komite internasional inilah yang secara praktis bertanggungjawab terhadap perkembangan profesionalisme di museum. Badan-badan inilah yang dijadikan wadah untuk memajukan pelbagai cabang keahlian dan keterampilan di bidang permuseuman. ICOFOM (International Committee for Museology) baru didirikan belakangan, yakni pada waktu diselenggarakan Konferensi Internasional ICOM di Moskwa tahun 1977. Di sinilah terbukti, bahwa praktek dan pengalaman mendahului akumulasi dan abstraksi keilmuan. Pada akhir-akhir ini seringkali dilakukan pertemuan gabungan, misalnya antara komite internasional untuk didikan dan latihan dengan ICOFOM. ICOFOM juga berusaha untuk melakukan pertemuan-pertemuan dengan komite-komite internasional ICOM lainnya, sebab komite-komite internasional itu, bagaimanapun juga secara praktis mengembangkan pelbagai spesialisasi profesional, yang dapat memberikan umpanbalik bagi usaha-usaha pengembangan museologi yang menjadi bidang garapan ICOFOM.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang motivasi didirikannya ICOM, hal ini dapat dibaca pada Statutes of ICOM article 7, yang bunyinya sebagai berikut:

- (a) To define, support and aid museums and the museum institution; to establish, support, and reinforce the museum profession.
- (b) To organize co-operation and mutual assistance between museums and between the members of the museum profession in the different countries.
- (c) To emphasize the importance of the role played by museums and the

museum profession within each community and the promotion of greater knowledge and understanding among peoples.

ICOM bersifat sebagai suatu perhimpunan yang 'ORNOP' dan profesional. hal ini dapat dibaca pada article 6:

ICOM is the international, non-governmental, and professional organization representing museums and the museum profession. In this capacity it maintains close consultative and cooperative relations with UNESCO, ICOMOS, and the International Centre for Conservation, and with other national, regional, or international, inter-governmental or non-governmental organizations, with the authorities responsible for museums and with specialists of other disciplines."

Dan akhirnya apabila masih ada pertanyaan: "What is the philosophy behind", maka jawabnya justru harus sudah diketahui, sebab hal ini tersirat dalam definisi tentang museum menurut ICOM, yang berbunyi:

A museum is a non-profitmaking, permanent institution in the service of society and of its development, and open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates, and exhibits, for purposes of study, education and enjoyment, material evidence of man and his environment.

Oleh karena itu maksud dan tujuan penyelenggaraan dan pengelolaan museum yang memiliki jiwa sangat manusiawi tidak mungkin dapat terlaksana, kalau komponen-komponen penggerakannya, baik pihak penyelenggaranya, maupun pihak pengelolanya, tidak berusaha untuk mengembangkan profesi para karyawan museumnya.

Yang disebut sebagai pihak penyelenggara, ialah Pemerintah yang mendirikan dan menyelenggarakan museum. Dan sudah diketahui bahwa sejak beberapa tahun secara teratur telah diselenggarakan penataran-penataran tenaga teknis permuseuman, baik dari tipe dasar, tipe khusus maupun tipe kejuruan. Usaha menambah pengetahuan, meningkatkan keahlian dan keterampilan para karyawan museum dan calon karyawan museum, mudah-mudahan dapat pula dilangsungkan melalui program museologi di Universitas Indonesia. Tetapi dari pihak pengelola museum, diharapkan juga ada usaha

serupa yang mungkin dapat melalui wadah asosiasi museum atau dengan usaha intern di kalangan karyawan sendiri, sebab sejumlah judul kepustakaan museologi sudah ada di beberapa perpustakaan museum. Misalnya dengan mengadakan pertemuan dan diskusi berdasarkan bahan kepustakaan, berdasarkan pengalaman dan rekaman dari para staf selama mereka bekerja, dan usaha-usaha lainnya.

Pada naskah ceramah ini, dilampirkan suatu bagan mengenai ruang lingkup museologi dan kaitannya dengan pelbagai disiplin lainnya, mengenai kaitan antara general museology, special museology, historical museology, theoretical museology dengan applied museology, paling tidak hal ini akan menyadarkan kita, bahwa sebagai pengelola museum, dituntut suatu penguasaan atas museology sebagai bidang ilmu dan keahlian. Sebagai generalis juga tidak perlu menjadi awam mengenai applied museology yang menjadi bidang garapan para staf teknis, dan sebagai ilmuwan haruslah memahami tentang apa yang disebut special museology.

Pada bagian kedua dari ceramah ini, lebih banyak akan disajikan ilustrasi dengan cara penyampaian sebagai suatu percobaan kajian kasus.

Di bagian atas sudah diungkapkan tentang timbulnya profesionalisme di bidang industri otomotif. Mulai dari proses produksi, sampai kepada proses distribusi dan pemeliharaan oleh konsumen, industri otomotif tidak mungkin berhasil kalau tidak didukung oleh profesionalisme. Tanpa dukungan tersebut bisa berakibat fatal, sebab antara lain dapat menimbulkan kecelakaan, baik selama proses produksi, maupun jika hasilnya sudah di tangan konsumen.

Yang sekarang ini kita hadapi adalah, bahwa berkat adanya REPELITA, kita telah terlibat dalam suatu proses pendirian museum-museum baru atau proses pemugaran dan perluasan museum-museum lama, kemudian disusul dengan pelbagai proses kegiatan fungsionalisasinya dengan didukung oleh proses pengadaan dan proses pendidikan dan latihan personil. Hasil seluruh proses ini, secara jelas bertujuan agar bermanfaat bagi masyarakat sebagai konsumen (dalam istilah ekonomi). Sekalipun disebut-sebut, bahwa museum itu merupakan lembaga tetap yang bersifat 'non-profit making', tetap masih harus dilihat apakah benefisial atau tidak.

Salah satu tolok ukur yang selama ini digunakan adalah jumlah pengunjung secara periodik, bulanan atau tahunan. Hal ini baru merupakan penilaian secara kuantitatif. Kalau suatu museum ternyata hanya dikunjungi

oleh jumlah pengunjung yang sedikit, museum tersebut akan dinilai sebagai tidak benefisial, tidak menguntungkan, atau mubazir. George Henri Riviere (bekas Direktur ICOM) pernah mengungkapkan bahwa “Museum bukan saja menghimpun benda-benda koleksi, tetapi museum juga mengumpulkan publi, sebab koleksi museum adalah untuk kepentingan publiknya”. Jadi, bila kemudian di kalangan para ahli permuseuman terdapat gerakan atau kegiatan edukatif berupa “museum outreach”, baik dengan pelayanan penyediaan dan pengiriman berbagai peti kemas koleksi dan sarana audiovisual untuk kepentingan sekolah-sekolah, sampai pada kegiatan pameran keliling, maka alasannya adalah rumus George Henri Riviere itu tadi. Jadi, merupakan sesuatu yang janggal apabila ada suatu museum yang mencoba mengurangi arus pengunjung, apalagi bila kelompok pengunjung itu tadi berasal dari komunitas lembaga pengajaran. Yang perlu diambil tindakan ialah pengaturan yang menguntungkan pihak-pihak yang bersangkutan.

Yang menarik adalah kegiatan Museum Sumpah Pemuda di Jakarta, yang menugaskan stafnya berkeliling ke sekolah-sekolah untuk mengadakan ceramah dengan tujuan antara lain supaya kelak anak-anak itu akan mengunjungi museum. Dalam hal hubungan museum dengan masyarakat lingkungannya itulah dapat dilakukan survai dalam rangka usaha pemasaran atau usaha pemasyarakatan museum. Dalam hal pemasaran inipun seorang ‘manager’ harus bersikap profesional. Jadi, kalau ada yang mengatakan bahwa salah satu sebab berkurangnya kunjungan ke museum, karena masyarakat lebih senang mengunjungi toko-toko swalayan, maka jelas bahwa jawaban itu bisa dipandang sebagai jawaban a priori, sebab belum pernah dilakukan survai terlebih dahulu, atau belum didukung oleh fakta dan data. Tetapi dalam hal usaha pemasaran, jelas manager toko serba ada atau toko swalayan lebih profesional sikap dan tindakannya. Mereka tetap memperhatikan bahwa omset yang besar akan memberikan keuntungan yang tidak kecil, sekalipun per satuan marge keuntungannya tetap kecil. Lalu untuk menarik sebanyak mungkin pengunjung - calon pembeli -, para maneger toko itu melengkapi tokonya dengan pelbagai sarana rekreasi. Para orang tua, yang mungkin tadinya datang ke toko swalayan memang bertujuan untuk rekreasi, tetapi anak-anak mereka di samping telah terhibur di tempat hiburan atau tempat mainan, bisa saja anak-anak itu kemudian merengek-rengok minta dibelikan apa saja yang mungkin ada, dan kemudian orang tuanya pun terbesit di benaknya untuk sekaligus membeli barang-barang yang diperlukan.

Contoh lain tentang usaha pemasaran di jaman para Wali Sanga. Usaha

penyiaran agama Islam di kalangan orang Jawa yang taat kepada agama Hindu atau agama Budha di saat itu adalah merupakan usaha yang sangat sulit. Untuk menarik orang Jawa tersebut agar mau pergi ke mesjid, maka dimainkanlah gamelan di halaman mesjid. Dan masih banyak contoh lain lagi.

Dalam hal usaha memperoleh pengunjung sebanyak mungkin ke museum, pengalaman di Malaysia dan Bangkadesh dapat dipakai sebagai perbandingan. Tetapi dalam hal ini harus diperhitungkan bahwa masing-masing lingkungan masyarakat mempunyai corak tersendiri. Untuk keperluan itu museum perlu melakukan suatu survei sederhana, baik dengan daftar pertanyaan tertulis (questionnaire atau enquette) maupun dengan cara wawancara dengan mengajukan pertanyaan sederhana dan dalam jumlah yang sedikit. Misalnya:

1. Apakah anda pernah ke Museum Negeri Jawa Barat di Tegal Lega?  
Jawab Ya atau Tidak.
2. Bila pernah berkunjung, berapa kali?
3. Bila belum pernah berkunjung, apa sebabnya?  
Jawab: ( ) tidak tahu (karena ignoransi)  
( ) tidak punya minat.  
( ) belum sempat.

Hasilnya mudah dikumpulkan dan dianalisa. Berdasarkan hasil survai itu akan diketahui apakah museum itu memang belum dikenal oleh masyarakat, atau memang masyarakatnya sama sekali tidak punya minat. Kemudian dapat diusahakan pelbagai rencana usaha pemasaran, mulai tingkat pengenalan sampai tingkat rasa memiliki.

Tetapi dalam hal ini, harus ada sikap kritis. Apakah “barang hasil produksi yang akan dipasarkan tersebut memiliki kualitas tinggi, dan tidak akan mengecewakan konsumen?” Untuk itu perlu dilakukan survei terhadap publik museumnya sendiri tentang motivasi pengunjung dan penilaian pengunjung. Metode yang dapat digunakan adalah dengan cara pengisian daftar pertanyaan terhadap suatu kelompok tertentu dan wawancara terhadap kelompok lainnya, serta observasi staf terhadap perilaku pengunjung.

Di antara kegiatan fungsional museum-museum baru atau museum berpenampilan baru hasil pembangunan Repelita, prioritas hendaknya diberikan kepada usaha pelayanan bagi masyarakat, baik usaha-usaha presentasi

maupun usaha-usaha kegiatan edukatif kultural supaya masyarakat secara langsung merasakan manfaat kehadiran museum itu di tengah kehidupan mereka. Ini tidak berarti bahwa kegiatan lain tidak penting, tetap saja sama penting, sebab bila kegiatan pengelolaan administratif dan ilmiah terhadap koleksi serta kegiatan konservasi koleksi terbengkalai, maka ia pun akan memberikan tanda akan adanya mismanagement.

Buku karya tulis Dr Van Wengen mengenai Presentasi dan Edukasi sudah dicetak. Mudah-mudahan akan bermanfaat bagi peningkatan pelayanan presentasi dan kegiatan edukasi museum. Materinya diusahakan supaya dapat diterapkan oleh museum-museum di Indonesia.

Pengelola museum diharapkan bekerja secara profesional. Salah satu usaha untuk memperluas pengetahuan ialah menambah pengetahuan melalui kegiatan baca tulis. Menurut pengamatan penulis, kegiatan ini masih perlu ditingkatkan. Banyak membaca akan memperluas cakrawala dan pengalaman. Menulis media komunikasi sesama kawan seprofesi. Majalah Museografia terbitan Direktorat Permuseuman merupakan media yang tepat untuk tujuan tersebut.

(Ceramah pada acara Forum Diskusi dan Komunikasi Kepala Museum di lingkungan Ditjen Kebudayaan, Jakarta, 30 Juli 1986)

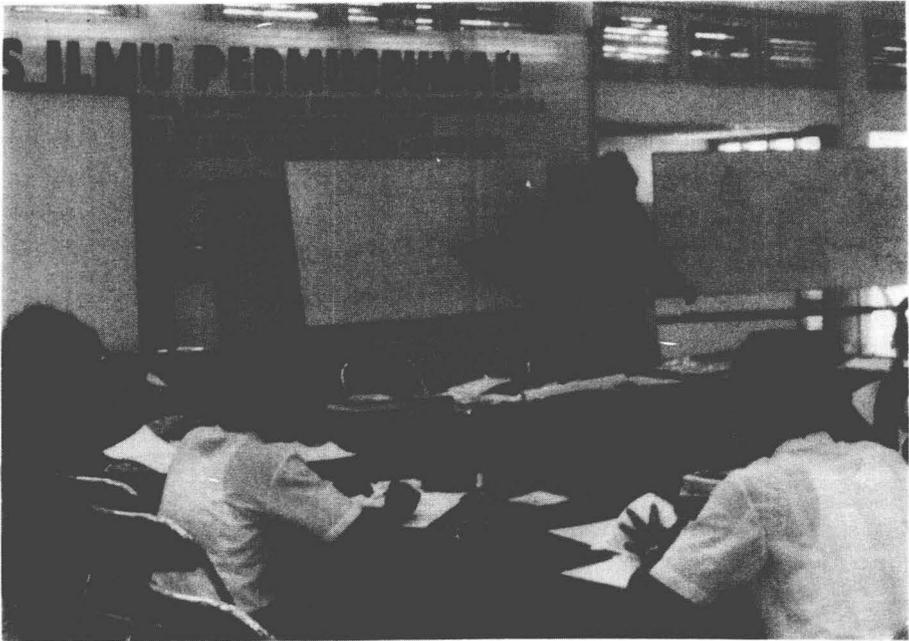
#### Bahan Kepustakaan

Alma S. Wittlin 1949 : *The Museum. Its History and Tasks in Education*

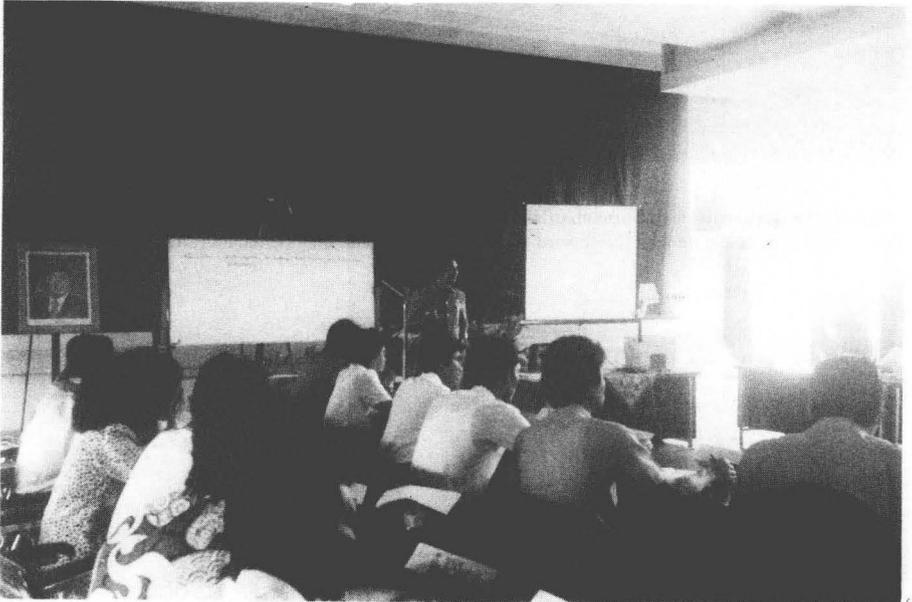
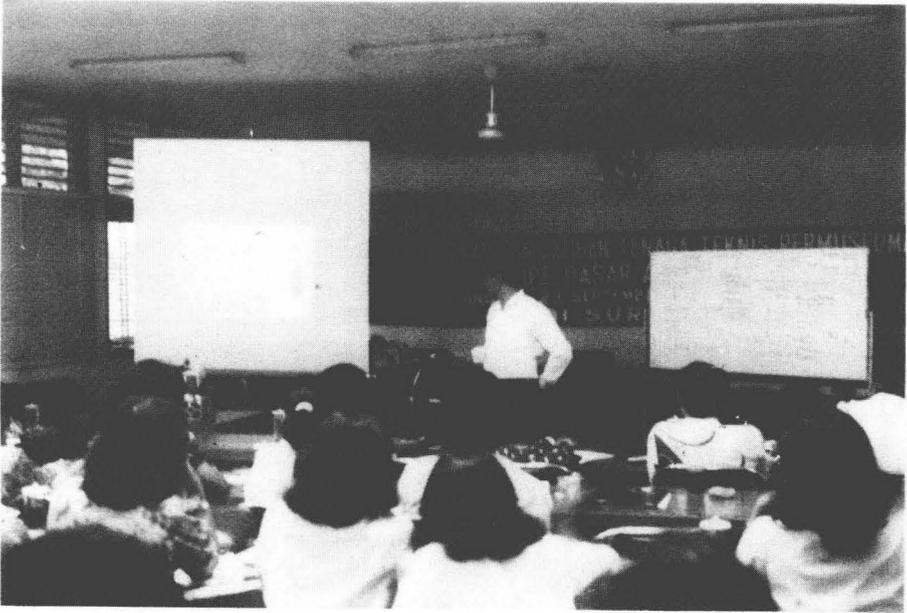
Keneth Hudson 1977 : *Museums for the 1980s. A Survey of World Trends*

G. Ellis Burcaw 1979 : *Introduction to Museum Work*

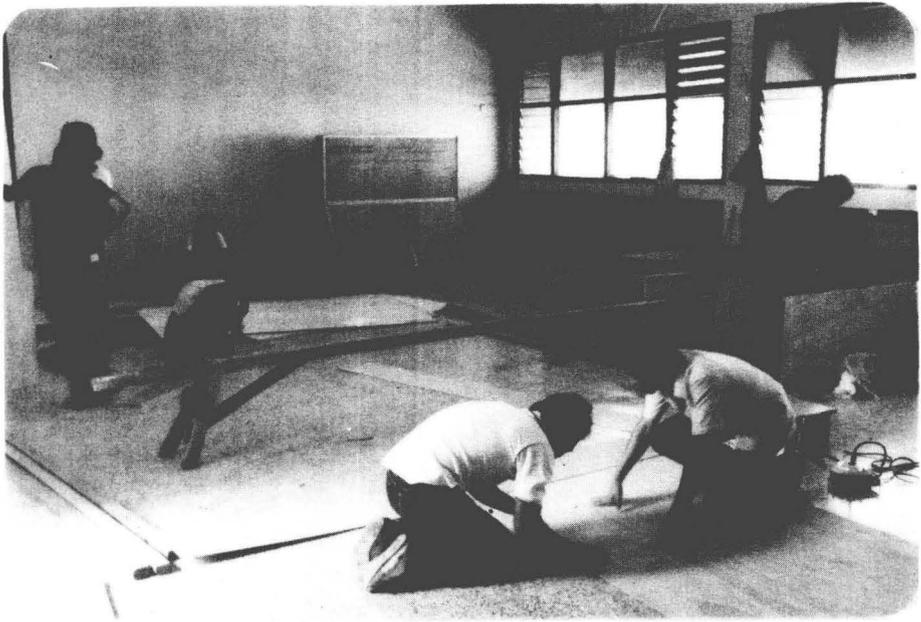
ICOM 1974 : *Statutes of The International Council of Museums*



Peningkatan profesionalisme di Museum dilakukan melalui berbagai cara, antara lain dengan bekerjasama dalam bidang pendidikan dengan Reindward academi Leiden untuk memperdalam ilmu permuseuman.



Peningkatan profesionalisme di museum juga dilakukan melalui berbagai penataran ilmu permuseuman dan diskusi-diskusi yang dilaksanakan secara berkala bagi para pengelola museum.



Untuk menyiapkan suatu pameran khusus di museum, diperlukan pula tenaga-tenaga yang profesional di bidangnya.

